

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017 – 2022



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2017

---

---

## KATA PENGANTAR

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Satuan Kerja yang menangani urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan memiliki kewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Strategis sebagai memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen Perencanaan Strategis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses penyusunannya telah mengikuti tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berbagai instansi dan pemangku kepentingan ikut dilibatkan pada proses penyusunannya dengan harapan Dokumen Perencanaan yang disusun nantinya merupakan kesepakatan berbagai pihak dan dapat di implementasikan dengan baik serta memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan tahun 2017 – 2022 di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga dengan adanya dokumen perencanaan strategis ini dapat memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada akhirnya nanti dapat membuat layanan bidang pendidikan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik lagi.

Pangkalpinang, Oktober 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640324 198903 1 008

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	33
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	
4.1. Visi dan Misi .....	
4.2. Tujuan dan Sasaran .....	
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD .....

LAMPIRAN .....

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. PENDAHULUAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan bagian proses dan tujuan pembangunan nasional termasuk juga bagian dari proses dan tujuan pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang disadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan merupakan upaya yang utama disamping pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan dibidang pendidikan bukan hanya sekadar pemerataan pendidikan saja, tetapi juga peningkatan kualitas serta relevansi pendidikan. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah hingga pemberian kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan ke depan. Secara umum ada tiga tantangan utama pembangunan bidang pendidikan, yaitu kesempatan mengakses pendidikan, mutu layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat serta relevansi penyelenggaraan pendidikan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja terampil.

---

Mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan pembangunan, tentunya dibutuhkan sebuah perencanaan strategis pendidikan yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga menghasilkan hasil pembangunan bidang pendidikan yang optimal. Perencanaan strategis sendiri merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu memberikan arah pembangunan bidang pendidikan 5 tahun kedepan hingga tahun 2022.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
-

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini yaitu untuk memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun kedepan agar peningkatan pembangunan bidang pendidikan dapat tercapai secara

---

optimal berdasarkan analisis kondisi terkini pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan harapan yang akan diraih untuk lima tahun ke depan dengan memperhatikan segala sumber daya yang tersedia.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran secara detail Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan.
2. Sebagai alat pedoman untuk pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

---

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Bab ini menggambarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 – 2017 yang ditempuh dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang kearah kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang. Bab ini juga berisikan landasan filosofis pembangunan pendidikan, paradigma pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tujuan Strategis yang ingin dicapai yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang merupakan tolok ukur dari tujuan strategis yang hendak dicapai, serta strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis tersebut.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan strategis yang dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara bertahap untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan serta pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan.

---

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

---

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 5 (lima) kewenangan pada urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Ruang lingkup kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam hal :

- Pengelolaan Pendidikan Menengah
- Pengelolaan Pendidikan Khusus

b. Ruang Lingkup Kurikulum

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup kurikulum memiliki kewenangan dalam hal :

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Menengah.
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Khusus.

c. Ruang Lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kewenangan dalam hal Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Ruang Lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada ruang lingkup Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan memiliki kewenangan dalam hal :

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
-

- Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan kewenangan ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

**TUGAS :**

Membantu Gubernur untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

**FUNGSI :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

---

## 1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan. Uraian tugas dan fungsi sekretariat sebagai berikut :

### Tugas :

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Fungsi :

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kerjasama antar lembaga, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
  - Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
  - Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
  - Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dan perbendaharaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
  - Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan pengelolaan dana dekonsentrasi di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, *penyiapan bahan*
-

*rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;*

- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada sekretariat terdapat 3 unit tugas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan **Kerjasama Antar Lembaga (PKAL)**. Adapun uraian dari unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Subbag Umum dan Kepegawaian yaitu sebagai berikut :

##### **Tugas :**

Membantu Sekretaris melaksanakan Penataan administrasi umum perkantoran, Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, Penataan dan pengembangan Organisasi dan Penataan kepegawaian serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **B. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

Sub Bagian Keuangan dan BMD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun uraian tugas dan fungsi dari Sub Bagian Keuangan dan BMD yaitu sebagai berikut :

---

**Tugas :**

Membantu sekretaris melakukan penatausahaan keuangan, dan BMD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**C. Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan, Kerjasama antar Lembaga dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Adapun tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Kerjasama antar Lembaga dan Tugas Pembantuan yaitu sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu sekretaris melaksanakan penyusunan Perencanaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan tugas pembantuan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. BIDANG PEMBINAAN SMA**

Bidang Pembinaan SMA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

**Fungsi :**

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.

**3. BIDANG PEMBINAAN SMK**

Bidang Pembinaan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan SMK memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

---

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi :**

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- Pengkajian pemberian izin penyelenggaraan SMK oleh masyarakat.
- Pengkajian kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan SMK.
- Pembinaan penilaian hasil pembelajaran.
- Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan dan pembangunan karakter pada jenjang pendidikan SMK.
- Analisa kebutuhan Pemenuhan sarana dan prasana pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SMK.
- Pembinaan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan jenjang SMK.

Pada Bidang Pembinaan SMK terdapat 3 (tiga) unit tugas, yaitu Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter, dan Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana. Rincian tugas dan fungsi dan masing-masing unit tugas tersebut yaitu sebagai berikut :

---

#### **4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS**

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan layanan pendidikan khusus di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Fungsi :**

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
  - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
  - penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
  - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
  - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
  - Pelaksanaan pelayanan deteksi dini dan terapi bagi penderita autisme.
  - pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.
-

## **5. BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rincian tugas dan fungsi Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dirinci sebagai berikut :

### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penataan dan pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

### **Fungsi :**

- Penyusunan bahan kebijakan terkait dengan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Penerapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan dan penataan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian perlindungan dan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kajian dan analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- Pemberian rekomendasi mutasi guru dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat rentang kendali yang sangat luas serta dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, maka terdapat beberapa Cabang Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun cabang dinas tersebut yaitu sebagai berikut :

---

### **1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka yaitu sebagai berikut :

#### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

#### **Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

### **2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat yaitu sebagai berikut :

---

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

**Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat
- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Barat.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Barat.

**3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan yaitu sebagai berikut :

**Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

**Fungsi :**

- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
-

- Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan.

#### **4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur**

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uraian tugas dan fungsi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur yaitu sebagai berikut :

##### **Tugas :**

Membantu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan satuan pendidikan provinsi di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

##### **Fungsi :**

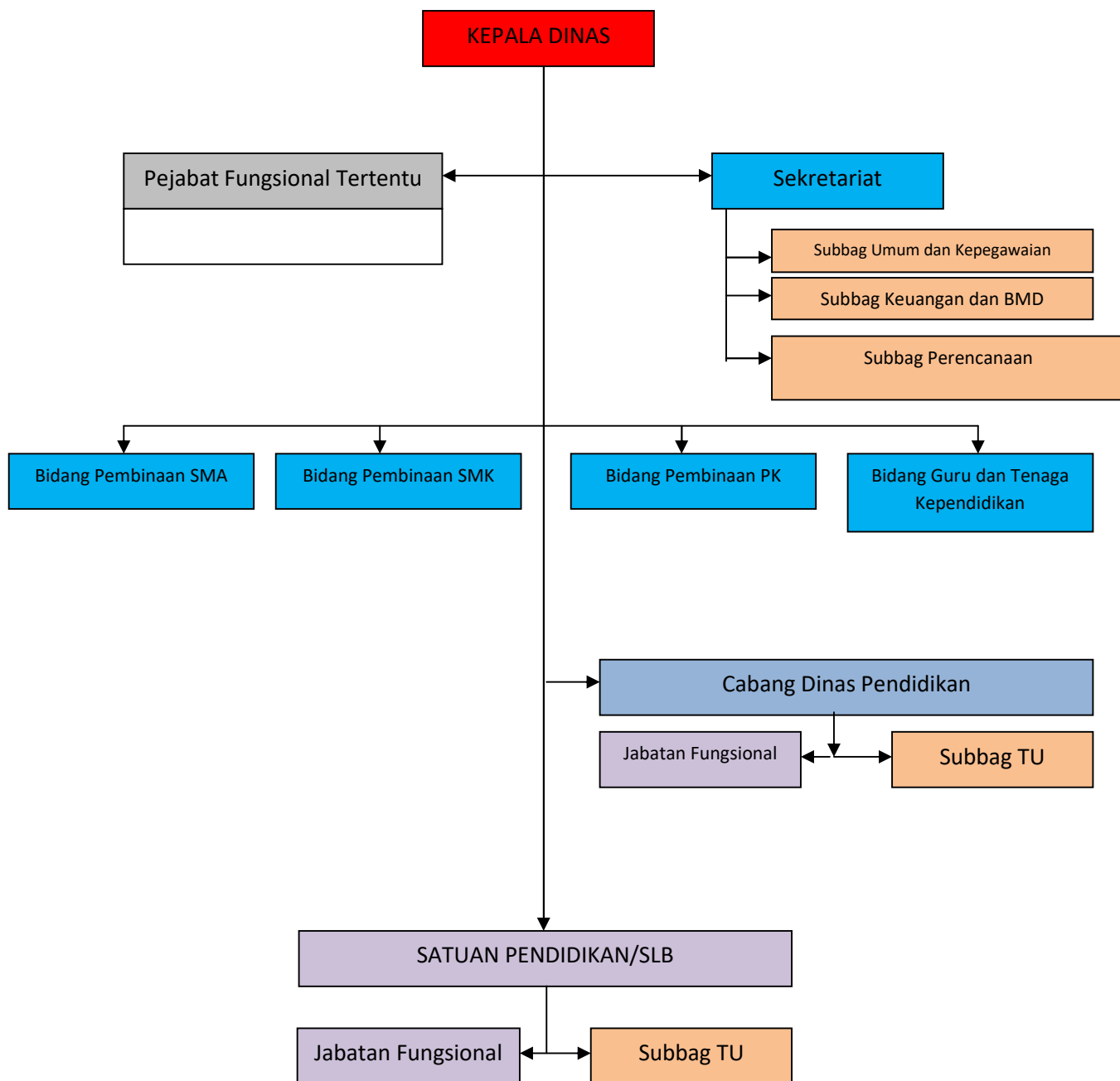
- Pembinaan dan pengawasan pelayanan pada Satuan Pendidikan Provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
  - Pelaksanaan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
  - Koordinasi penyusunan perencanaan pada tingkat satuan pendidikan provinsi di lingkungan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
-

- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan kesiswaan pada satuan pendidikan provinsi di tingkat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Satuan Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan provinsi pada Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berupa satuan pendidikan. Satuan Pendidikan tersebut berupa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu juga terdapat UPTD yang mengelola Pendidikan Khusus terpadu yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Sekolah Luar Biasa bentuk Taman kanak-kanan luar biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :

---



**Gambar 2 :** *Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hingga saat ini terdapat 4.528 (empat ribu lima ratus dua puluh delapan) orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang berstatus PNS maupun Non PNS. Untuk yang berstatus PNS seluruhnya berjumlah 2.004 (dua ribu empat) orang dan yang non PNS seluruhnya berjumlah 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) orang yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.

#### **a. SDM pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

Pada Kantor Dinas Pendidikan terdapat 111 (seratus sebelas) orang pegawai yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) orang berjenis kelamin laki-laki dan 42 (empat puluh dua) orang berjenis kelamin perempuan dengan uraian 11 (sebelas) orang pegawai memiliki pendidikan S2, 62 (enam puluh dua) orang pegawai memiliki pendidikan S1, 15 (Lima belas) orang memiliki pendidikan Diploma, dan 23 (Dua puluh tiga) orang memiliki pendidikan SMA sederajat.

Berdasarkan pangkat/golongan, sebagian besar (54 orang) merupakan pegawai golongan III, 13 orang pegawai golongan VI, dan 17 orang pegawai golongan II.

Tabel berikut menunjukkan tingkat pendidikan dan pangkat golongan di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

**Tabel 2.1. Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan (Orang)					Total
		S2	S1	D3	SM	SMP	
1	Pembina Utama Muda (IV C)	2					2
2	Pembina Tk. I (IV B)	1	3				4
3	Pembina (IV A)	3	4				7
4	Penata Tk. I (III D)	4	10	1			15
5	Penata (III C)		13				13
6	Penata Muda Tk. I (III B)	1	16				17
7	Penata Muda (III A)		7	2			9
8	Pengatur Tk. I (II D)			6	1		7
9	Pengatur (II C)			4	2		6
10	Pengatur Muda Tk. I (II B)				3		3
11	Pengatur Muda (II A)				1		1
14	Non PNS (Honorar)		9	2	16		27
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

b. SDM pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan.

Jumlah pegawai pada kantor Cabang Dinas Pendidikan sebagian besar merupakan tenaga fungsional pengawas sekolah. Tabel berikut menunjukkan jumlah SDM di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.2. Pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan**

No	UPTD Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka		Pengawas Sekolah
2	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Barat		Pengawas Sekolah
3	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan		Pengawas Sekolah
4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur		Pengawas Sekolah
<b>JUMLAH</b>			

c. SDM pada UPTD Satuan Pendidikan.

Hingga saat ini terdapat 4.396 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) orang guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLM di lingkungan satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah pegawai di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.3. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Jenjang**

Jenjang Pendidikan	Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai								
		PNS			Non PNS			Total		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T
SMA	Guru	346	503	849	324	363	687	670	866	1536
	Tenaga Kependidikan	59	42	101	267	225	492	326	267	593
	Total 1	405	545	950	591	588	1179	996	1133	2129
SMK	Guru	414	405	819	359	372	731	773	777	1550
	Tenaga Kependidikan	32	28	60	260	205	465	292	233	525
	Total 2	446	433	879	619	577	1196	1065	1010	2071
SLB	Guru	27	63	90	19	40	59	46	103	149
	Tenaga Kependidikan	0	1	1	18	24	42	18	25	43
	Total 3	27	64	91	37	64	101	64	131	195
DPK	Guru	6	12	18	0	0	0	6	12	18
	Tenaga Kependidikan									
	Total 3	6	12	18	0	0	0	6	12	18
Total		884	1052	1936	1247	1229	2476	2131	2281	4412

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

a. Sumber daya Sarana dan Prasarana Dinas.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kantor yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam – Pangkalpinang. Kantor yang berlantai 2 memiliki luas kantor .... m<sup>2</sup>. Pada kantor Dinas Pendidikan terdapat 1 (satu) ruang pertemuan kecil dan 1 (satu) ruang pertemuan besar. Seluruh ruangan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan kamera pengaman (CCTV). Untuk mendukung kerja pegawai, di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung dilengkapi dengan jaringan internet

beserta komputer dan printer, lemari arsip dan filling cabinet, meja dan kursi kerja, meubelair tamu serta meja dan kursi rapat.

b. Sumber daya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

Hingga saat ini pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) SMA Negeri, 34 (tiga puluh empat) SMK dan 7 (tujuh) SLB dan telah direncanakan di tahun 2018 akan bertambah 2 (dua) satuan pendidikan lagi pada jenjang SMA dan SMK. Selain itu, juga terdapat 24 (dua puluh empat) SMA Swasta, 20 (dua puluh) SMK swasta dan 2 (dua) SLB swasta. Semua satuan pendidikan ini tersebar merata di 7 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tabel berikut menunjukkan jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.6. Jumlah SMA, SMK dan SLB**

No	Wilayah	SMA			SMK			SLB			TOTAL
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	
1	Kab. Bangka	17	10	7	11	5	6	2	1	1	30
2	Kab. Bangka Barat	10	6	4	8	4	4	1	1	0	19
3	Kab. Belitung	6	4	2	7	5	2	1	1	0	14
4	Kab. Belitung Timur	7	5	2	7	4	3	1	1	0	15
5	Kab. Bangka Selatan	10	8	2	7	6	1	1	1	0	18
6	Kab. Bangka Tengah	7	6	1	5	5	0	1	1	0	13
7	Kota Pangkalpinang	10	4	6	9	5	4	2	1	1	21
Total	Total	67	43	24	54	34	20	9	7	2	130

*Sumber : Dapodik (Juli 2017)*

Untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagian telah dilengkapi dengan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya serta sarana olah raga. Tabel berikut menunjukkan fasilitas pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.7. Jumlah dan kondisi Ruang Kelas dan Ruang Penunjang lainnya SMA, SMK dann SLB**

No	Jenis Ruang	SMA	SMK	SLB	TOTAL
1	Ruang kelas	857	822	x	1.842
	a. Baik	514	444	x	1.110
	b. Rusak ringan	311	344	x	666
	c. Rusak Sedang	11	11	x	22
	d. Rusak Berat	19	6	x	25
	e. Rusak Total	2	17	x	19
2	Perpustakaan	62	46	x	135
	a. Baik	62	45	x	129
	b. Rusak	0	1	x	6
3	Ruang UKS	35	24	x	59
	a. Baik	35	21	x	56
	b. Rusak	0	3	x	3
4	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	40	25	x	82
	a. Milik	40	25	x	82
	b. Bukan Milik	0	0	x	0
5	Laboratorium *)	161	89	x	266
	a. Baik	157	86	x	258
	b. Rusak	4	3	x	8
6	Ruang praktik gambar teknik SMK	x	0	x	0
	a. Baik	x	0	x	0
	b. Rusak	x	0	x	0

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada Rencana Strategis sebelumnya, pengukuran kinerja layanan dinas pendidikan memasukkan penilaian kinerja seluruh urusan bidang pendidikan termasuk penilaian kinerja untuk jenjang SD, SMP, dan Pendidikan Non Formal. Penilaian kinerja yang dilakukan pada akhir tahun 2016, sebagian kinerja telah mencapai diatas 100 % dari target yang ditetapkan dalam rencana seperti angka mengulang SD, angka DO SMP, dan lain-lain. Namun ada juga yang kinerja layanan pendidikan belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan seperti pencapaian APK Pendidikan menengah yang hanya mencapai 85.92% di tahun 2016 dan diperkirakan di tahun 2017 hanya akan mencapai 83,38 %.

Berikut adalah kinerja layanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada evaluasi capaian rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017.

#### A. Capaian Kinerja Program PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah kunci untuk membangun karakter anak yang tangguh dan memiliki budi pekerti. Hadirnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan dasar bagi anak - anak sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Capaian kinerja Program PAUD merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, penyediaan bantuan biaya untuk penyelenggaraan operasional pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis *Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat*, kemudian capaian masing-masing sasaran program tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini hingga Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	APK PAUD	%	37,82	47,31	44,51	42,84	96,25	50,83
Jumlah Rata-Rata capaian							96,25	

#### B. Capaian Kinerja Program DIKDAS

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs).

Capaian kinerja Program DIKDAS merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, penyediaan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan bantuan biaya untuk penyelenggaraan operasional pendidikan dan penguatan sistem tata kelola pendidikan. )Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis *Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat*, kemudian capaian masing-masing sasaran program tampak pada tabel berikut :

---

**Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Dasar Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8
Layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	APK SD Sederajat	%	114,46	113,87	116,25	108,00	92,90	116,26
	APM SD Sederajat	%	92,62	96,83	96,61	92,75	96,00	97
	Angka DO SD/MI	%	<b>0,39</b>	<b>0,25</b>	<b>0,33</b>	<b>0,07</b>	<b>178,79</b>	<b>0,30</b>
	Angka Melanjutkan SD/MI	%	94,48	87,17	99,24	86,29	86,95	100
	Rata-rata kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100	100
	Angka Mengulang SD/MI.	%	<b>5,77</b>	<b>0,85</b>	<b>4,94</b>	<b>2,96</b>	<b>140,08</b>	<b>4,00</b>
	APK SMP Sederajat	%	95,08	94,67	96,85	93,55	96,59	97,96
	APM SMP Sederajat	%	63,79	68,92	80,07	68,84	85,97	84
	Angka Drop Out (DO) SMP/MTs	%	<b>0,82</b>	<b>0,28</b>	<b>0,36</b>	<b>0,05</b>	<b>186,11</b>	<b>0,23</b>
	Persentase kelulusan SMP/MTs	%	99,96	99,97	100	99,29	99,29	99,35
	Angka Mengulang SMP/MTs	%	0,56	0,14	0,53	0,42	79,24	0,45
Jumlah Rata-Rata capaian							112,90	

### C. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

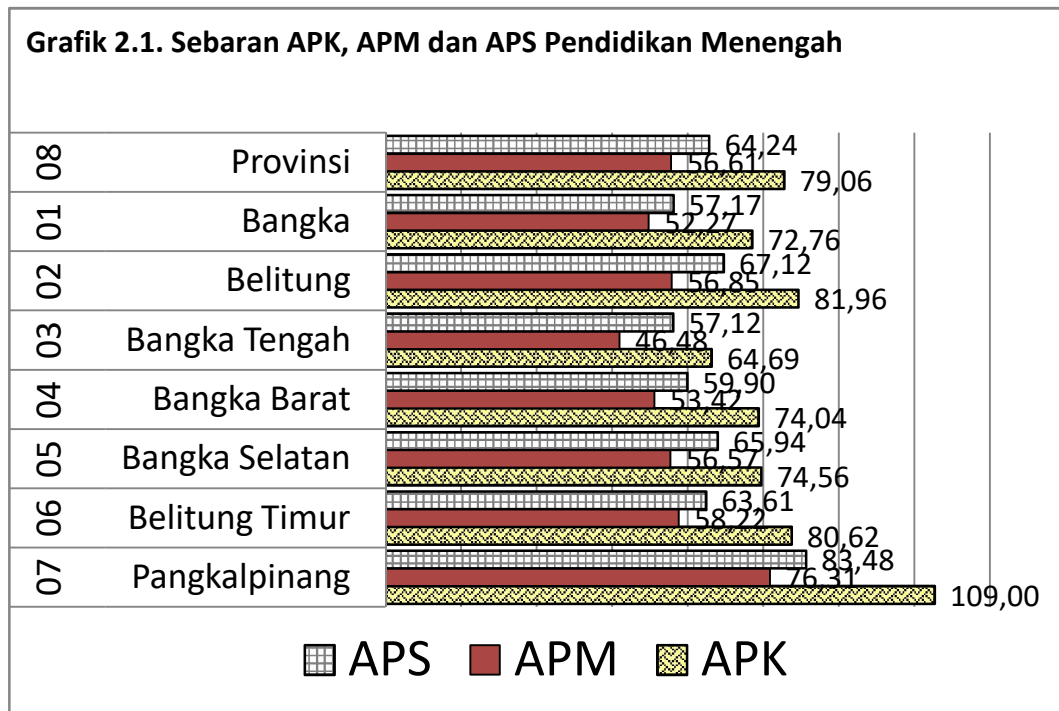
Capaian kinerja Program Pendidikan Menengah dan Tinggi merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, penyediaan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan bantuan biaya untuk penyelenggaraan operasional pendidikan dan penguatan sistem tata kelola pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis *tersedia dan terjangkau*nya layanan pendidikan menengah dan

tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, kemudian capaian masing-masing sasaran program tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	2016			Target Akhir Renstra
					Target	Real.	% Capaian	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Layanan Pendidikan Menengah dan Tinggi Yang Berkualitas Bagi Seluruh Masyarakat	APK Pendidikan Menengah	%	73,28	69,46	88,08	79,06	89,76	95,95
	APM Pendidikan Menengah	%	50,81	35,56	53,380	56,61	106,05	75
	Angka DO SMA/MA	%	1,32	2,83	0,55	0,09	<b>183,84</b>	0,31
	Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA	%	99,93	99,97	99,64	99,80	100,16	99%
	Angka Mengulang SMA/MA	%	0,83	0,45	0,55	0,49	110,91	0,46
	Persentase Kelulusan Siswa SMK	%	99,98	99,98	99,64	99,64	100	99,95
	Angka Mengulang SMK	%	1,16	0,23	0,55	0,09	183,84	0,20
	Jumlah Lulusan Pendidikan Menengah yang Tidak Mampu dan Berprestasi yang Melanjutkan ke PT	Orang	12	14	100	311	100	14
Jumlah Rata-Rata capaian							<b>121,82</b>	

Untuk lebih jelasnya, perkembangan APK, APM dan APS Pendidikan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



#### D. Capaian Kinerja Program Pendidikan Nonformal

Capaian kinerja Program PNFI merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, penyediaan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan bantuan biaya untuk penyelenggaraan operasional pendidikan dan penguatan sistem tata kelola pendidikan. Selanjutnya program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis *tersedia dan terjangkau layanan pendidikan nonformal yang berkualitas bagi seluruh masyarakat*, kemudian capaian masing-masing sasaran program tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Program Pendidikan NonFormal Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	2016			Target Akhir Renstra
					Target	Real.	%	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
Layanan Pendidikan Nonformal dan Informal yang Berkualitas bagi seluruh masyarakat	Jumlah warga Belajar Paket A, B dan C	orang	7905	8244	9802	7768	79,25	8244
	Persentase Kelulusan UNPK Paket A	%	100	86,85	75	95,97	127,96	100
	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	%	96,23	85,94	75	95,01	126,68	96,23
	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	%	91,33	86,06	75	97,98	130,64	91,33
	Angka Buta Aksara penduduk usia 15 keatas	%	3,59	2,66	<b>2,87</b>	2,37	117,42	3,59
	Lembaga Kursus terakreditasi minimal B	lembaga	10	18	<b>20</b>	18	110,00	10
Jumlah Rata-Rata capaian							<b>115,33</b>	

#### E. Capaian Kinerja Manajemen Layanan Pendidikan

Capaian kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan merupakan salah satu program penting dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diarahkan untuk penguatan sistem tata kelola pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis *tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas*, kemudian capaian masing-masing sasaran program tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	2016			Target Akhir Renstra
					Target	Real	%	
1	2	3		4	5	6	7	8
Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas	Tersedianya seluruh data pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung	Dok	2	2	2	2	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dok	4	3	2	3	150	100
	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Dok	3	3	3	3	100	100
Jumlah Rata-Rata capaian							100 %	

#### F. Capaian Kinerja Layanan Administrasi Pemerintahan

Untuk mendukung ketercapaian telah dilaksanakan 3 Program Pendukung, yaitu Program Layanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Disiplin Pegawai. Hingga tahun 2016, capaian kinerja untuk pelaksanaan program ini telah mencapai 100 %. Adapun uraian capaian kinerja dari layanan administrasi pemerintahan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Layanan Administrasi Perkantoran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Tahun 2014	Real. Tahun 2015	2016			Target Akhir Renstra
					Target	Real	%	
1	2	3		4	5	6	7	8
Tersedianya dukungan layanan administrasi pemerintahan	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100%	12
	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	Bulan	12	12	12	12	100%	12
	Peningkatan Disiplin Pegawai	Bulan	12	12	12	12	100%	12
Jumlah Rata-Rata capaian							100 %	

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengacu ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu untuk melaksanakan fungsi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu Gubernur juga memiliki fungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang pada pelaksanaannya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan.

Berdasarkan hal ini, maka Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta melaksanakan fungsi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa tantangan dan peluang pengembangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

### A. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hingga saat ini capaian keterlayanan akses pendidikan menengah yang diukur dengan capaian APK Pendidikan Menengah masih dibawah rata-rata nasional.</li> <li>2. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi Kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata hingga ke pulau-pulau kecil dan memiliki beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh transportasi umum.</li> <li>3. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar yang diukur dengan pencapaian APK SMP dibawah 95 %.</li> <li>4. Rendahnya pemahaman masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus terutama untuk jenis kebutuhan khusus siswa dengan katagori slow learner (lambat belajar) serta penderita autisme.</li> </ol>
-----------	---

Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menuntaskan wajib belajar hingga pendidikan menengah.</li> <li>2. Beberapa Kabupaten/kota telah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rata-rata APK SMP sederajat telah mencapai diatas rata-rata nasional.</li> <li>3. Telah tersedianya Satuan Pendidikan Menengah di seluruh kecamatan di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> </ol>
---------	--

## B. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata nilai Ujian Nasional Siswa SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dibawah rata-rata nasional.</li> <li>2. Masih ada satuan pendidikan yang terakreditasi C dan belum terakreditasi.</li> <li>3. Masih ada guru SMA, SMK dan SLB yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1/D4.</li> <li>4. Kompetensi guru yang belum memadai jika diukur dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG).</li> <li>5. Keterbatasan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS terutama untuk satuan pendidikan di daerah terpencil.</li> <li>6. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di jenjang SMA, SMK dan SLB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>7. Keterbatasan lahan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB terutama di daerah perkotaan sehingga sulit untuk mengembangkan satuan pendidikan tersebut .</li> <li>8. Masih ada satuan pendidikan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik dan jaringan internet terutama di daerah terpencil.</li> </ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.</li> <li>2. Sebagian besar satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB telah terakreditasi minimal B.</li> <li>3. Tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang cukup memadai.</li> </ol>

**C. Relevansi Pendidikan Vokasi**

Tantangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program keahlian SMK masih ada yang belum relevan dengan potensi daerah serta kebutuhan tenaga kerja.</li><li>2. Masih terbatasnya Unit/Bengkel Produksi pada pendidikan SMK.</li><li>3. Keterbatasan jumlah guru produktif SMK.</li><li>4. Keterbatasan satuan pendidikan SMK yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1</li></ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Potensi Daerah yang sangat beragam dan masih memungkinkan untuk dikembangkan seperti sektor pariwisata, pertanian, kelautan dan kemaritiman.</li><li>2. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemenuhan guru produktif SMK.</li><li>3. Adanya Dunia Usaha dan Dunia Industri yang memungkinkan untuk diajak kerjasama dalam pengembangan program keahlian SMK.</li><li>4. Koordinasi dengan instansi dan OPD teknis lainnya yang telah berjalan cukup baik.</li></ol>

### BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mengacu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Berdasarkan kewenangan ini dan mengacu kinerja tingkat layanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa ada beberapa capaian indikator target kinerja yang belum tercapai seperti tingkat akses layanan pendidikan menengah yang diukur dengan Angka Partisi Kasar (APK) Sekolah Menengah. Capaian APK Sekolah menengah hingga tahun 2016 baru mencapai 79 % dari target ketuntasan 95 %.

Dari aspek mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus, apabila ditinjau dari hasil akreditasi sekolah, baru 67,17 % SMA, SMK dan SLB yang terakreditasi minimal B. Selain itu rata-rata nilai ujian nasional siswa SMA dan SMK juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peringkat rata-rata nilai ujian nasional dibawah 25 dari 34 provinsi. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan ini diantaranya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, kompetensi guru yang masih rendah, perlunya dukungan masyarakat dibidang pendidikan serta diperlukan adanya motivasi belajar bagi siswa agar mampu meraih prestasi.

Khusus untuk pendidikan vokasi (SMK) ternyata diketahui bahwa belum relevan antara program keahlian SMK dengan Potensi Daerah serta potensi kebutuhan tenaga kerja di pasaran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana praktik produktif di SMK, ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) – P1 di SMK, keterbatasan guru produktif dan perlunya dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta instansi teknis pemerintah terkain lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

---

Secara detail, identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Layanan OPD	Tingkat keterlayanan pendidikan menengah dibawah 95 %	APK Dikmen	Ketersediaan daya tampung SMA	Sebaran penduduk yang tidak merata hingga ke pulau-pulau kecil	Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah
			Ketersediaan layanan pendidikan khusus yang terbatas	Rendahnya pemahaman masyarakat bagi siswa yang berkebutuhan khusus	
			Angka melanjutkan ke Dikmen masih rendah	Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar	
Layanan OPD	% sekolah yang terakreditasi min B baru mencapai 67,17 %	Akreditasi Sekolah	Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan	Partisipasi masyarakat dibidang pendidikan	Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah
	Hasil ujian nasional siswa SMA/SMK di peringkat dibawah 25 nasional	Rata-rata nilai UN Nasional	Kompetensi guru yang rendah	Motivasi belajar siswa	
Kajian terhadap renstra K/L	Relevansi antara program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja yang belum sesuai	% Lulusan SMK yang bekerja	Keterbatasan Unit Produktif SMK	Dukungan Dunia usaha dan Dunia Industri.	Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja
			Ketersediaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) di sekolah	Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Terkait	
			Keterbatasan Guru Produktif SMK	Tidak adanya PT Kependidikan untuk guru produktif SMK	

### 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan oleh pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

Untuk mencapai visi ini ada 2 (dua) misi yang terkait dengan pembangunan bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan sumberdaya manusia unggul dan handal
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi.

Tabel berikut merupakan faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

**Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : <b>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih rendah</li> <li>2. Mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang masih rendah</li> <li>3. Belum relevannya program keahlian SMK dengan potensi daerah dan kebutuhan tenaga kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daya tampung pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terbatas.</li> <li>2. Belum terpenuhinya 8 standar nasional pendidikan.</li> <li>3. Ketersediaan Ruang praktik produktif SMK yang terbatas.</li> <li>4. Belum terbentuknya LSP-P1 di SMK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran min 20 % dari APBD.</li> <li>2. Telah tersedianya SMA dan SMK di setiap kecamatan.</li> <li>3. Kerjasama dengan DUDI dan Instansi Pemerintah lainnya</li> </ol>
	Sasaran : Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat			
2	Misi 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi	<p>Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan masih B</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi dan koordinasi yang belum optimal untuk penyusunan dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen dari pemerintah provinsi untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel</li> </ol>
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel			

### 3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019 telah ditetapkan visi Kemendikbud di tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

#### Visi Kemendikbud 2019:

**“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai visi ini telah dilaksanakan 5 (lima) misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Ada 16 sasaran strategis dalam upaya pelaksanaan 5 misi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel berikut menunjukkan permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 - 2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya perilaku positif siswa	- Peningkatan perilaku positif siswa masih lambat	- Kurangnya guru BP di sekolah. - Kurangnya partisipasi masyarakat	Pendidikan keluarga sudah dimas
2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Kurangnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pendidikan.		Adanya perda tentang pendidikan
3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Sebagian besar guru memiliki nilai UKG dibawah 50 % Tidak pernah dilakukan penilaian kualitas tenaga kependidikan	Penilaian Kompetensi hanya terbatas pada Kompetensi Pedagogi dan Profesi. Belum ada penilaian kompetensi untuk tenaga kependidikan	Tersedianya sarana untuk pelatihan kepribadian dan sosial GTK
4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Merupakan kewenangan Disbudpar		
5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota			-
6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK Pendidikan menengah masih dibawah rata-rata nasional	Angka melanjutkan SMP yang rendah. Angka DO masih cukup tinggi	Adanya koordinasi dengan Disdik Kab/Kota. Telah disediakan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				beasiswa miskin
7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	-	-	-
8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Mutu layanan pendidikan menengah masih rendah	Belum terpenuhinya 8 SNP	Dukungan anggaran pendidikan
9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Nilai rata-rata UKG Guru dibawah 60. Sebagian besar tenaga kependidikan berstatus tenaga tidak tetap. Kekurangan guru Produktif SMK	UKG hanya dilakukan 1 kali setahun. Tidak tersedianya PT Kependidikan di Babel	
10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Belum semua satuan pendidikan memprogramkan kegiatan pendidikan keluarga	Terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pendidikan keluarga	Dapat dilakukan pada
11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk pendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	-	-	-
12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	-	-	-
13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	-	-	-
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Penilaian LAKIP Disdik Prov baru mencapai 66,15 (B)	Dokumen Perencanaan yang tidak sinkron	Adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait
15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-
16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	-	-	-

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Seperti diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar serta ratusan pulau kecil yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Sebagian besar wilayah provinsi ini merupakan wilayah pertambangan serta ada beberapa wilayah yang merupakan daerah rawan bencana terutama rawan banjir.

Tabel berikut menunjukkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang terkait dengan permasalahan layanan bidang pendidikan :

**Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lokasi pemukiman terletak di daerah kepulauan yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi umum	Masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman	Lokasi pemukiman masyarakat tidak bisa diakses oleh transportasi umum	Sebagian masyarakat memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan
2	Pengembangan kawasan ekonomi khusus dibidang kepariwisataan	Belum memadainya Sarpras SMK kepariwisataan	- Keterbatasan lahan pengembangan satuan pendidikan - Keterbatasan Guru Produktif	Kerjasama dengan DUDI ke pariwisata
3	Daerah rawan bencana	Beberapa satuan pendidikan terletak di daerah rawan banjir	Sulit untuk mengalokasikan rehabilitasi sekolah yang terkena bencana	Telah dilakukan mitigasi bencana di daerah rawan bencana

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berdasarkan hasil telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur, telaah terhadap renstra Kemendikbud dan telaah terhadap RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditentukan isu-isu strategis di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya akses layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.**
  - 2. Rendahnya mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus.**
  - 3. Belum relevannya program keahlian pada pendidikan vokasi dengan Potensi Daerah dan kebutuhan tenaga kerja.**
-

### BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya tak lepas serta merupakan bagian dari visi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Perumusan visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) yang telah dilakukan sebelumnya serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai hingga tahun 2022.

Dari aspek tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengacu pada ketentuan ini, Dinas Pendidikan memiliki fungsi menyelenggarakan **urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

**“LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG TERJANGKAU DAN BERMUTU DAN MAMPU MENYEDIAKAN TENAGA KERJA TERAMPIL, BERDAYA SAING DAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL”**

Pernyataan visi ini mengandung makna sebagai berikut :

1. **Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**, yaitu layanan untuk masyarakat dibidang pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, dan pada jenjang pendidikan khusus bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
2. **Terjangkau**, mengandung arti bahwa setiap layanan pendidikan menengah dan khusus dapat dijangkau atau diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kelompok umur dan kebutuhan khusus siswa.
3. **Bermutu**, mengandung makna bahwa setiap layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4. **Mampu Menyediakan Tenaga Kerja Terampil**, mengandung makna bahwa lulusan pendidikan vokasi jenjang menengah (SMK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kemampuan sesuai dengan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, dan mampu mengembangkan usaha dengan pemanfaatan potensi lokal yang ada diwilayah masing-masing.
5. **Berdaya saing**, mengandung makna bahwa setiap lulusan dari pendidikan menengah dan pendidikan khusus mampu bersaing dengan lulusan pendidikan sejenis, baik dalam persaingan memperoleh pekerjaan, maupun dalam persaingan untuk mendapat kesempatan di jenjang pendidikan tinggi.
6. **Berbasis Keunggulan Lokal**, mengandung makna bahwa setiap lulusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Bangka Belitung memahami keunggulan lokal di wilayah masing-masing serta untuk lulusan SMK mampu untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada.

Untuk mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang dilaksanakan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

---

Bangka Belitung 2017 - 2022 yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

Kode	Rumusan Misi
<b>M1</b>	<b>Meningkatkan Akses Pendidikan</b>
<b>M2</b>	<b>Meningkatkan Mutu Pendidikan</b>
<b>M3</b>	<b>Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis Keunggulan Lokal</b>
<b>M4</b>	<b>Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan</b>

Selain visi dan misi diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari bahwa visi dan misi yang digambarkan diatas sulit untuk terwujud apabila tidak didukung oleh seluruh komponen pendidikan. Untuk itu diperlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan dan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam visi. Tata nilai yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :**“Profesionalisme, Demokratis, Transparan dan Akuntabel, berkeadilan dan visioner”**.

Tata nilai ini dikemas dalam satu kalimat yang merupakan semangat dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meraih cita-citanya yang digambarkan sebagai visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 – 2012 yaitu sebagai berikut :

***“Memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan”***

Selain tata nilai diatas, pelaksanaan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

**a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya**

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai insan manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan sosial.

Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri, sebagai elemen/bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi.

**b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik**

**(Long Life Education to People Centered Development)**

Pembelajaran merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup (**long life education**), yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multi makna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi sederajat), pendidikan non formal, dan pendidikan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian lintas satuan dan jalur pendidikan. Mengingat keterbatasan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerapan paradigma pendidikan sepayang hayat ini dibatasi dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pendidikan.

Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan dan pembentukan ahlak mulai, budi pekerti luhur dan watak

---

kepribadian atau karakter unggul serta berbagai kecakapan hidup (**life skills**). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajaran mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, inovatif, sportif dan memiliki jiwa kewirausahaan.

### c. Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan hak setiap warga negara seperti yang digambarkan dalam UUD 1945 dimana usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dibidang pendidikan dan sekaligus menjadi investasi sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta **berkesetaraan gender** agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial (berkebutuhan khusus). Berkesetaraan gender sebagaimana diatas dimaksudkan bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan dilakukan untuk semua lapisan masyarakat tanpa memperhatikan jenis kelamin, suku/ras, agama dan golongan.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan non formal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lainnya yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata dan berkeadilan.

---

## 4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk pelaksanaan misi diatas tentu saja diperlukan adanya penetapan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan yang ditetapkan tersebut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi

Adapun tujuan dari rencana pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2017 – 2022 yaitu dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 4..1. Rumusan Tujuan**

Misi	Rumusan Tujuan
Meningkatkan Akses Pendidikan yang terjangkau	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Pendidikan Mutu Menengah dan Pendidikan Khusus
Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis Keunggulan Lokal	Relevansi Pendidikan Vokasi
Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan	Penyediaan Dukungan Layanan Manajemen Pendidikan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Difokuskan pada sasaran :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK.
- b. Peningkatan Akses Pendidikan Khusus

2. Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Difokuskan pada sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa.

3. Relevansi Pendidikan Vokasi.

Difokuskan pada sasaran Peningkatan relevansi pendidikan SMK.

4. Penyediaan Dukungan Layanan Manajemen Pendidikan

Difokuskan pada sasaran pemberian dukungan manajemen pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan.

Keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2. Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Akses Pendidikan yang terjangkau	Meningkatnya Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.	Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK	APK Pendidikan Menengah
		Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Pendidikan Mutu Menengah dan Pendidikan Khusus	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi Min A
Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis Keunggulan Lokal	Adanya Relevansi Pendidikan Vokasi	Peningkatan relevansi pendidikan SMK	% Lulusan SMK yang Bekerja
Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan	Tersedianya Dukungan Layanan Manajemen Pendidikan	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara lengkap sasaran serta target kinerja sasaran pada rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Sasaran dan target indikator sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK	APK Pendidikan Menengah	%	72,58%	76,49%	85,77%	89,67%	96,10%	100%
Peningkatan Akses Pendidikan Khusus	APK Pendidikan Khusus	%	54,06%	61,24%	68,43%	75,62%	82,81%	90%
Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan SLB	Persentase SMA, SMK dan SLB Terakreditasi Min A	%	35,66%	40,15%	44,03%	50,37%	56,30%	62,22%
Peningkatan relevansi pendidikan SMK	Persentase Lulusan SMK yang Bekerja/Melanjutkan	%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Poin	4	4	4	4	5	5

### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Agar tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan bidang pendidikan, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan untuk menjamin tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan diatas. Penetapan strategi dan kebijakan ini tentunya telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.

Strategi dan arah kebijakan sendiri merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut adalah perumusan strategi dan kebijakan umum untuk setiap upaya pencapaian target sasaran pembangunan bidang pendidikan :

#### 1. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Akses Pendidikan SMA dan SMK.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Motivasi orang tua rendah.. 2. Jauhnya jarak sekolah ke pemukiman
Kekuatan : 1. Sistem manajemen berbasis sekolah dan masyarakat.	Alternatif Strategi : 1. Memperbaiki Sistem Penerimaan Siswa baru	Alternatif Strategi : 1. Membangun Asrama siswa
Kelemahan: 1. Keterbatasan daya tampung sekolah. 2. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Angka DO cukup tinggi	Alternatif Strategi : 1. Menambah Ruang Kelas Baru (RKB). 2. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) 3. Menambah jumlah GTK 4. Menyediakan Beasiswa bagi siswa tidak mampu	Alternatif Strategi : 1. Menerapkan Pendidikan Keluarga pada jenjang SMA/SMK 2. Merevitalisasi guru BK

#### 2. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Akses Pendidikan Khusus.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk anak berkebutuhan khusus. 2. Jauhnya jarak sekolah ke pemukiman
Kekuatan : 1. Tersedianya Pusat Layanan Autis.	Alternatif Strategi : 1. Memperbaiki Sistem Penerimaan Siswa baru. 2. Optimalisasi fungsi PLA	Alternatif Strategi : 1. Mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus. 2. Membangun Asrama siswa
Kelemahan: 1. Keterbatasan daya tampung sekolah. 2. Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.	Alternatif Strategi : 1. Menambah Ruang Kelas Baru (RKB). 2. Menambah jumlah GTK	Alternatif Strategi : 1. Menerapkan Pendidikan Keluarga pada jenjang Pendidikan khusus

## 3. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Mutu Pendidikan SMA dan SMK

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi	Tantangan: 1. Daya saing siswa dan lulusan rendah. 2. Nilai UN rendah
Kekuatan : 1. Tersedianya guru dan tenaga kependidikan di sekolah. 2. Tersedianya siswa di sekolah	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 2. Memberi penghargaan dan perlindungan bagi guru.	Alternatif Strategi : 1. Melaksanakan lomba-lomba siswa dan GTK. 2. Menyediakan beasiswa prestasi. 3. Melaksanakan pelatihan kurikulum bagi guru. 4. Try out UN
Kelemahan: 1. Sarpras belum memadai. 2. Kompetensi guru rendah. 3. Kualifikasi guru rendah. 4. Pengelolaan sekolah belum memadai. 5. Pembiayaan operasional sekolah belum memadai. 6. Pengawasan pelaksanaan KBM belum optimal.	Alternatif Strategi : 1. Memenuhi Sarpras. 2. Rehabilitasi Sarpras 3. Meningkatkan kompetensi guru. 4. Menyediakan beasiswa kualifikasi GTK. 5. Melaksanakan Sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek. 6. Menyediakan Biaya Operasional Sekolah. 7. merevitalisasi peran Pengawas Sekolah	Alternatif Strategi :

## 4. Strategi Pencapaian Indikator Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi.

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Dukungan pembiayaan dari APBD dan APBN melalui DAK cukup Tinggi 2. Adanya Koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait.	Tantangan: 1. Bervariasinya potensi lokal di setiap daerah. 2. Kurangnya kerjasama dengan DUDI
Kekuatan : 1. Tersedianya lembaga pendidikan SMK	Alternatif Strategi : 1. Membentuk LSP-P1 2. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait.	Alternatif Strategi : 1. Menyesuaikan Program keahlian SMK 2. Menyusun Kurikulum berbasis keunggulan lokal. 3. Melakukan Kerjasama dengan DUDI. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis kewirausahaan.
Kelemahan: 1. Sarpras produktif belum memadai. 2. Jumlah guru produktif terbatas.	Alternatif Strategi : 1. Menyediakan sarpras produktif. 2. Menyediakan beasiswa bagi calon guru SMK.	Alternatif Strategi : 1. Menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>Penerimaan Siswa baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membangun Asrama siswa</li> <li>5. Menerapkan Pendidikan Keluarga pada jenjang SMA/SMK</li> <li>6. Merevitalisasi guru BK</li> <li>7. Optimalisasi fungsi PLA</li> <li>8. Mendeteksi dini anak berkebutuhan khusus.</li> </ol>	berkebutuhan khusus
Meningkatnya Pendidikan Mutu Menengah dan Pendidikan Khusus	Peningkatan Mutu Pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Memberi penghargaan dan perlindungan bagi guru.</li> <li>3. Memenuhi Sarpras.</li> <li>4. Rehabilitasi Sarpras</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi guru.</li> <li>6. Memberi beasiswa kualifikasi GTK.</li> <li>7. Melaksanakan Sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek.</li> <li>8. Menyediakan Biaya Operasional Sekolah dan Asrama.</li> <li>9. Merevitalisasi peran Pengawas Sekolah</li> <li>10. Melaksanakan lomba-lomba siswa dan GTK.</li> <li>11. Menyediakan beasiswa prestasi.</li> <li>12. Melaksanakan Pelatihan kurikulum bagi guru.</li> <li>13. Merevitalisasi peran Pusat Layanan Autis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesejahteraan guru.</li> <li>2. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi guru</li> <li>3. Pemenuhan kebutuhan Sarpras sesuai SNP</li> <li>4. Rehabilitasi sarpras yang rusak.</li> <li>5. Peningkatan Kompetensi Guru.</li> <li>6. Pemberian Beasiswa kualifikasi bagi GTK</li> <li>7. Pelaksanaan sertifikasi Kepsek dan Calon Kepsek.</li> <li>8. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah dan Asrama</li> <li>9. Revitalisasi peran pengawas sekolah.</li> <li>10. Pelaksanaan lomba-lomba siswa dan GTK.</li> <li>11. Penyediaan beasiswa prestasi bagi siswa berprestasi</li> <li>12. Pelatihan kurikulum bagi guru</li> <li>13. Revitalisasi PLA</li> </ol>
Adanya Relevansi Pendidikan Vokasi	Peningkatan relevansi pendidikan SMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan sarpras produktif.</li> <li>2. Menyediakan beasiswa bagi calon guru SMK.</li> <li>3. Menyesuaikan Program keahlian SMK</li> <li>4. Menyusun Kurikulum berbasis keunggulan lokal.</li> <li>5. Melakukan Kerjasama dengan DUDI.</li> <li>6. Menerapkan pembelajaran berbasis kewirausahaan.</li> <li>7. Membentuk LSP</li> <li>8. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait.</li> <li>9. Menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarpras produktif.</li> <li>2. Penyediaan beasiswa bagi calon guru SMK.</li> <li>3. Penyesuaian Program Keahlian SMK</li> <li>4. Penyusunan Kurikulum berbasis Keunggulan lokal</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama dengan DUDI</li> <li>6. Penerapan pembelajaran berbasis kewirausahaan</li> <li>7. Pembentukan LSP pada satuan pendidikan</li> <li>8. Pelaksanaan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait</li> <li>9. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran.</li> </ol>
Tersedianya Dukungan Layanan Manajemen Pendidikan	Peningkatan layanan Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan biaya administrasi perkantoran.</li> <li>2. Meningkatkan Sarpras pegawai.</li> <li>3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan.</li> <li>4. Mengoptimalkan penyusunan laporan dan pelaksanaan Monev</li> <li>5. Menerapkan disiplin pegawai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan biaya administrasi perkantoran.</li> <li>2. Peningkatan sarpras aparatur</li> <li>3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan.</li> <li>4. Pelaksanaan penyusunan laporan dan Monev.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai.</li> <li>7. Mengoptimalkan peran Cabdin Kab/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan disiplin pegawai.</li> <li>6. Peningkatan Kompetensi Pegawai</li> <li>7. Optimalisasi peran Cabang Dinas Pendidikan</li> </ol>
	Peningkatan Dukungan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan.</li> <li>2. Menyediakan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah yang berprestasi.</li> <li>3. Menyediakan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah tidak mampu.</li> <li>4. Menyediakan bantuan keuangan kepada Kab/Kota</li> <li>5. Memfasilitasi penyaluran BOS APBN dan pemberian beasiswa siswa miskin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dengan kab/kota dan kementerian teknis terkait.</li> <li>2. Penyediaan beasiswa bagi lulusan pendidikan menengah dan mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu.</li> <li>3. Penyediaan bantuan keuangan kepada kab/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.</li> <li>4. Fasilitasi penyaluran BOS APBN dan dan pemberian beasiswa miskin</li> </ol>

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang tercantum pada bab sebelumnya.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

---

Tabel 5.1. Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Penanggungjawab
<b>A</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan</b>	<b>Sekretariat</b>
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Subbag Umum dan Kepegawaian
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Subbag Perencanaan
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Subbag Perencanaan
7	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Subbag Perencanaan
8	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Subbag Perencanaan
9	Fasilitasi ke jenjang pendidikan tinggi	Subbag Perencanaan
10	Dukungan Pelaksanaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	Subbag Perencanaan
11	Dukungan pelaksanaan pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	Subbag Perencanaan
12	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasiona	Subbag Perencanaan
13	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	Subbag Perencanaan
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-</b>	<b>Kabid SMA</b>
1	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMA
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Kasi Kesiswaan SMA
3	Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Kasi Kesiswaan SMA
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMA
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-</b>	<b>Kabid SMK</b>
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMK
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Kasi Kesiswaan SMK
3	Pengembangan Kurikulum SMK	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMK

No	Program/Kegiatan	Penanggungjawab
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Kasi Kesiswaan SMK
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Penugasan)	Kasi Sarpras dan Kelembagaan SMK
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus</b>	<b>Kabid Pendidikan Khusus</b>
1	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Kasi Sarpras dan Kelembagaan PK
2	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Kasi Kesiswaan PK
3	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Kasi Kurikulum dan Penilaian PK
4	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Penugasan)	Kasi Sarpras dan Kelembagaan PK
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-</b>	<b>Kabid GTK</b>
1	Peningkatan Mutu PTK SMA	Kasi GTK SMA
2	Peningkatan Mutu PTK SMK	Kasi GTK SMK
3	Peningkatan Mutu PTK SLB	Kasi GTK SLB
<b>F</b>	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</b>	<b>Cabdin Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</b>
	Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Kasubbag TU
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 1 Pangkalpinang
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 2 Pangkalpinang
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 3 Pangkalpinang
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 4 Pangkalpinang
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 5 Pangkalpinang
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Ka. SMA Negeri 1 Pangkalpinang
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Ka. SMA Negeri 2 Pangkalpinang
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Ka. SMA Negeri 3 Pangkalpinang

No	Program/Kegiatan	Penanggungjawab
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Ka. SMA Negeri 4 Pangkalpinang
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Ka. SLB Negeri Pangkalpinang
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Sungailiat
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Ka. SMK Negeri 2 Sungailiat
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Mendo Barat
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Belinyu
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Bakam
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Bakam
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Belinyu
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Mendobarat
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 2 Mendobarat
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Merawang
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Pemali
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Puding Besar
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Riau Silip
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 1 Sungailiat
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Ka. SMA Negeri 2 Puding Besar
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Ka. SLB Negeri Sungailiat
G	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Ka. Cabdin Pendidikan Wilayah Bangka Barat
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Kasubbag TU
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Mentok
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Kelapa
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Ka. di SMK Negeri 1 Parittiga

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Tempilang
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Simpang Teritip
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Jebus
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Kelapa
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Muntok
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Parit Tiga
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Simpang Teritip
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMA Negeri 1 Tempilang
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Ka. SLB Negeri Muntok
H	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Ka. Cabdin Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah	Kasubbag TU
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Koba
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 2 Koba
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Simpangkatis
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Pangkalanbaru
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Sungaiselan
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 1 Koba
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 1 Lubukbesar
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 1 Namang
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 1 Pangkalanbaru

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 1 Sungaiselan
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Ka. SMA Negeri 2 Sungaiselan
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Ka. SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Koba	Ka. SLB Negeri Koba
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Toboali
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Payung
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Pulau Besar
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Tukak Sadai
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Simpangrimba
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Airgegas
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Air Gegas
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Lepar Pongok
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 2 Lepar Pongok
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Payung
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Pulau Besar
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Simpang Rimba
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 1 Toboali
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. SMA Negeri 2 Toboali
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Ka. di SLB N Toboali

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
I	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Ka. Cabdin Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Kasubbag TU
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Tanjungpandan
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 2 Tanjungpandan
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 3 Tanjungpandan
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Badau
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Selat Nasik
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Ka. SMA Negeri 1 Membalong
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Ka. SMA Negeri 1 Sijuk
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Ka. SMA Negeri 1 Tanjung Pandan
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Ka. SMA Negeri 2 Tanjung Pandan
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Ka. SLB Negeri Tanjung Pandan
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Manggar
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Kelapa Kampit
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Dendang
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Simpang Renggiang
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SMA Negeri 1 Damar
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SMA Negeri 1 Gantung
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SMA Negeri 1 KelapaKampit
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SMA Negeri 1 Manggar
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SMA Negeri 1 Simpangpesak

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Ka. SLB Negeri Manggar
J	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Kadisdik
1	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Pangkalpinang	Ka. SLB N Pangkalpinang
2	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Sungailiat	Ka. SLB N Sungailiat
3	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Muntok	Ka. SLB N Sungailiat
4	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Koba	Ka. SLB N Koba
5	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Toboali	Ka. SLB N Toboali
6	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Tanjung Pandan	Ka. SLB N Tanjung
7	Kegiatan Pengelolaan BOS di SLB N Manggar	Ka. SLB N Manggar
8	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Sungailiat
9	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Ka. SMK Negeri 2 Sungailiat
10	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Mendo Barat
11	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Belinyu
12	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Ka. SMK Negeri 1 Bakam
13	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Mentok
14	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Kelapa
15	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Ka. di SMK Negeri 1 Parittiga
16	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Tempilang
17	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Simpang Teritip
18	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Ka. SMK Negeri 1 Jebus
19	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Koba
20	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 2 Koba
21	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Simpangkatis
22	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Pangkalanbaru

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
23	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Ka. SMK Negeri 1 Sungaiselan
24	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Toboali
25	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Payung
26	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Pulau Besar
27	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Tukak Sadai
28	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Simpangrimba
29	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	Ka. SMK Negeri 1 Airgegas
30	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Tanjungpandan
31	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 2 Tanjungpandan
32	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Ka. SMK Negeri 3 Tanjungpandan
33	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Badau
34	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Ka. SMK Negeri 1 Selat Nasik
35	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Manggar
36	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Kelapa Kampit
37	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Dendang
38	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	Ka. SMK Negeri 1 Simpang Renggang
39	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 1 Pangkalpinang
40	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 2 Pangkalpinang
41	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 3 Pangkalpinang
42	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 4 Pangkalpinang
43	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Ka. SMK Negeri 5 Pangkalpinang
44	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
45	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	
46	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	
47	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	
48	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	
49	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	
50	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	
51	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	
52	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	
53	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	
54	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	
55	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	
56	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	
57	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	
58	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	
59	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	
60	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	
61	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	
62	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	
63	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	
64	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	
65	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	
66	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	

No	Program/Kegiatan	Penanggungugat
67	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	
68	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	
69	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	
70	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	
71	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	
72	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	
73	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	
74	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	
75	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	
76	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	
77	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	
78	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	
79	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	
80	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	
81	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	
82	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	
83	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	
84	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	
85	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	
86	Kegiatan Pengelolaan BOS di SMA Keberbakatan Olahraga	

Secara lengkap uraian program dan kegiatan terlampir.

## **5.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF**

Untuk menguji tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tentu saja diperlukan adanya indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan beserta kelompok sasaran serta pagu indikatif untuk setiap kegiatan. Keselaran antara sasaran, program dan kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif untuk masing-masing pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

---

Tabel 5.2. Sasaran, Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target dan Pagu Indikatif 2017 – 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
A	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	%	100	100,0	27.925.000.000	100,0	26.935.000.000	100,0	28.925.000.000	100,0	30.165.000.000	100,000	30.665.000.000	100,0	144.615.000.000
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	%	100	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	7.700.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	%	100	100	3.500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	8.400.000.000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	%	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	100	1.100.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)	%	100	100	375.000.000	100	410.000.000	100	425.000.000	100	440.000.000	100	465.000.000	100	2.115.000.000
5	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	Dokumen	2	2	700.000.000	2	700.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	3	800.000.000	11	3.800.000.000
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	Laporan	4	4	250.000.000	5	265.000.000	6	280.000.000	7	295.000.000	8	310.000.000	30	1.400.000.000



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
B	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Persen	0	76,610	37.593.500.000	79,290	38.868.000.000	81,970	40.998.600.000	84,640	44.368.600.000	90,000	47.391.800.000	90,000	209.220.500.000
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah)	Sekolah		26	9.200.000.000	26	9.500.000.000	27	10.000.000.000	27	11.000.000.000	27	12.000.000.000	27	51.700.000.000
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		797	1.672.000.000	797	1.704.000.000	797	1.704.000.000	797	1.800.000.000	797	2.000.000.000	797	8.880.000.000
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah Siswa Terlayani di SMK N 1 Pangkalpinang (Siswa)	Siswa		1.500	2.850.000.000	1.500	3.000.000.000	1.500	3.000.000.000	1.500	3.500.000.000	1.500	3.500.000.000	1500	15.850.000.000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani (Orang)	Siswa		561	1.295.800.000	593	1.186.000.000	625	1.250.000.000	657	1.314.000.000	689	1.500.000.000	689	6.545.800.000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani (Orang)	Siswa		486	1.071.000.000	518	1.100.000.000	550	1.100.000.000	582	1.164.000.000	614	1.228.000.000	614	5.663.000.000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		340	752.400.000	372	744.000.000	404	808.000.000	436	872.000.000	468	936.000.000	468	4.112.400.000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		757	1.361.700.000	797	1.434.600.000	800	1.434.600.000	800	1.500.000.000	800	1.600.000.000	800	7.330.900.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		711	1.247.800.000	743	1.337.400.000	775	1.395.000.000	807	1.452.600.000	839	1.510.200.000	839	6.943.000.000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		795	1.441.800.000	827	1.488.600.000	859	1.546.200.000	891	1.603.800.000	923	1.661.400.000	923	7.741.800.000
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		599	1.000.000.000	631	1.135.800.000	663	1.193.400.000	695	1.251.000.000	727	1.308.600.000	727	5.888.800.000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani (Siswa)	Siswa		255	1.498.000.000	260	1.498.000.000	270	1.785.000.000	280	2.009.000.000	290	2.233.000.000	290	9.023.000.000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani (Siswa)	Siswa		1.060	2.464.000.000	1.082	2.184.000.000	1.124	2.248.000.000	1.156	2.312.000.000	1.188	2.376.000.000	1188	11.584.000.000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani (Siswa)	Siswa		659	1.452.000.000	691	1.382.000.000	723	1.446.000.000	755	1.510.000.000	787	1.574.000.000	787	7.364.000.000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk	Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani (Siswa)	Siswa		257	660.000.000	321	642.000.000	385	770.000.000	449	898.000.000	513	1.026.000.000	513	3.996.000.000
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani (Siswa)	Siswa		300	650.000.000	364	728.000.000	428	856.000.000	492	984.000.000	556	1.112.000.000	556	4.330.000.000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani (Siswa)	Siswa		217	550.000.000	281	562.000.000	345	690.000.000	409	818.000.000	473	946.000.000	473	3.566.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani (Siswa)	Siswa		217	410.000.000	281	585.000.000	345	642.600.000	409	700.200.000	473	757.800.000	473	3.095.600.000
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani (Siswa)	Siswa		482	936.000.000	514	925.200.000	514	925.200.000	514	950.000.000	514	950.000.000	514	4.686.400.000
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani (Siswa)	Siswa		488	927.000.000	520	936.000.000	552	993.600.000	552	993.600.000	552	1.000.000.000	552	4.850.200.000
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani (Siswa)	Siswa		175	250.000.000	207	372.600.000	239	430.200.000	271	487.800.000	303	545.400.000	303	2.086.000.000
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani (Siswa)	Siswa		416	736.200.000	448	806.400.000	480	864.000.000	512	921.600.000	512	950.000.000	512	4.278.200.000
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani (Siswa)	Siswa		775	1.431.000.000	800	1.440.000.000	800	1.440.000.000	800	1.500.000.000	800	1.500.000.000	800	7.311.000.000
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani (Siswa)	Siswa		489	950.000.000	521	937.800.000	553	995.400.000	585	1.053.000.000	617	1.110.600.000	617	5.046.800.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani (Siswa)	Siswa		306	424.800.000	338	608.400.000	370	666.000.000	402	723.600.000	434	781.200.000	434	3.204.000.000	
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani (Siswa)	Siswa		857	1.440.000.000	889	1.600.200.000	890	1.600.200.000	890	1.650.000.000	890	1.700.000.000	890	7.990.400.000	
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani (Siswa)	Siswa		96	250.000.000	160	288.000.000	224	403.200.000	288	518.400.000	352	633.600.000	352	2.093.200.000	
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani (Siswa)	Siswa		96	672.000.000	106	742.000.000	116	812.000.000	126	882.000.000	136	952.000.000	136	4.060.000.000	
C	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</b>	<b>Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat</b>	<b>Persen</b>		<b>0</b>	<b>76,610</b>	<b>15.901.800.000</b>	<b>79,290</b>	<b>16.815.200.000</b>	<b>81,970</b>	<b>18.114.800.000</b>	<b>84,640</b>	<b>19.214.400.000</b>	<b>90,000</b>	<b>20.185.000.000</b>	<b>90,000</b>	<b>90.231.200.000</b>
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sekolah terlayani (Sekolah)	Sekolah		12	4.700.000.000	12	5.500.000.000	12	6.000.000.000	13	6.300.000.000	13	6.500.000.000	13	29.000.000.000	
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani (Siswa)	Siswa		665	1.430.000.000	697	1.394.000.000	729	1.458.000.000	761	1.522.000.000	793	1.586.000.000	793	7.390.000.000	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani (Siswa)	Siswa		554	1.154.000.000	586	1.172.000.000	618	1.236.000.000	650	1.300.000.000	682	1.364.000.000	682	6.226.000.000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani (Siswa)	Siswa		607	1.320.000.000	639	1.278.000.000	671	1.342.000.000	703	1.406.000.000	735	1.470.000.000	735	6.816.000.000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani (Siswa)	Siswa		300	650.000.000	332	664.000.000	364	728.000.000	396	792.000.000	428	856.000.000	428	3.690.000.000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani (Siswa)	Siswa		64	250.000.000	128	256.000.000	192	384.000.000	256	512.000.000	288	576.000.000	288	1.978.000.000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani (Siswa)	Siswa		594	1.184.400.000	626	1.126.800.000	658	1.184.400.000	690	1.242.000.000	722	1.299.600.000	722	6.037.200.000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani (Siswa)	Siswa		601	1.292.400.000	633	1.139.400.000	665	1.197.000.000	697	1.254.600.000	729	1.312.200.000	729	6.195.600.000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani (Siswa)	Siswa		582	1.017.000.000	614	1.105.200.000	646	1.162.800.000	678	1.220.400.000	710	1.278.000.000	710	5.783.400.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani (Siswa)	Siswa		407	732.000.000	439	790.200.000	471	847.800.000	503	905.400.000	535	963.000.000	535	4.238.400.000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani (Siswa)	Siswa		591	966.600.000	623	1.121.400.000	655	1.179.000.000	687	1.236.600.000	719	1.294.200.000	719	5.797.800.000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani (Siswa)	Siswa		342	617.400.000	374	673.200.000	406	730.800.000	438	788.400.000	470	846.000.000	470	3.655.800.000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	Jumlah siswa SLB N Muntok terlayani (Siswa)	Siswa		75	588.000.000	85	595.000.000	95	665.000.000	105	735.000.000	120	840.000.000	120	3.423.000.000
D	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</b>	<b>Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</b>	<b>Persen</b>													
				<b>0</b>	<b>76,610</b>	<b>35.924.000.000</b>	<b>79,290</b>	<b>39.479.000.000</b>	<b>81,970</b>	<b>41.795.200.000</b>	<b>84,640</b>	<b>44.293.000.000</b>	<b>90,000</b>	<b>46.026.800.000</b>	<b>90,000</b>	<b>207.518.000.000</b>
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah)	Sekolah	26	27	14.024.000.000	28	14.000.000.000	28	14.300.000.000	29	14.800.000.000	29	15.000.000.000	29	72.124.000.000
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani (Siswa)	Siswa		665	990.000.000	697	1.394.000.000	729	1.458.000.000	761	1.522.000.000	793	1.586.000.000	793	6.950.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani (Siswa)	Siswa		738	1.470.000.000	770	1.540.000.000	802	1.604.000.000	834	1.668.000.000	866	1.732.000.000	866	8.014.000.000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani (Siswa)	Siswa		760	1.416.000.000	792	1.584.000.000	824	1.648.000.000	856	1.712.000.000	888	1.776.000.000	888	8.136.000.000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani (Siswa)	Siswa		873	1.836.000.000	900	1.800.000.000	900	1.800.000.000	900	1.800.000.000	900	1.800.000.000	900	9.036.000.000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani (Siswa)	Siswa		223	330.000.000	255	510.000.000	287	574.000.000	319	638.000.000	351	702.000.000	351	2.754.000.000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani (Siswa)	Siswa		662	1.125.000.000	694	1.249.200.000	726	1.306.800.000	758	1.364.400.000	790	1.422.000.000	790	6.467.400.000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Lubuk Besar terlayani (Siswa)	Siswa		422	621.000.000	454	817.000.000	486	874.800.000	518	932.400.000	550	990.000.000	550	4.235.200.000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani (siswa)	Siswa		417	792.000.000	449	808.200.000	481	865.800.000	513	923.400.000	545	981.000.000	545	4.370.400.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani (Siswa)	Siswa		467	547.200.000	499	898.200.000	481	955.800.000	513	1.013.400.000	595	1.071.000.000	595	4.485.600.000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan (Siswa)	Siswa		232	374.200.000	264	475.200.000	296	532.800.000	328	590.400.000	360	648.000.000	360	2.620.600.000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani (Siswa)	Siswa		551	997.200.000	583	1.049.400.000	615	1.107.000.000	647	1.164.600.000	679	1.222.200.000	679	5.540.400.000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani (Siswa)	Siswa		64	540.000.000	96	1.080.000.000	128	1.620.000.000	160	2.060.000.000	160	2.100.000.000	160	7.400.000.000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Jumlah siswa SLB N Koba terlayani (Siswa)	Siswa		59	357.000.000	70	490.000.000	80	560.000.000	90	630.000.000	100	700.000.000	100	2.737.000.000
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani (Siswa)	Siswa		723	1.364.000.000	787	1.574.000.000	851	1.702.000.000	915	1.830.000.000	947	1.894.000.000	947	8.364.000.000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani (Siswa)	Siswa		331	770.000.000	345	726.000.000	377	790.000.000	409	854.000.000	441	918.000.000	441	4.058.000.000
17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani (Siswa)	Siswa		89	300.000.000	121	300.000.000	153	306.000.000	185	370.000.000	217	434.000.000	217	1.710.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani (Siswa)	Siswa		313	572.000.000	345	690.000.000	377	754.000.000	409	818.000.000	441	882.000.000	441	3.716.000.000
19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani (Siswa)	Siswa		94	300.000.000	126	300.000.000	158	316.000.000	190	380.000.000	222	444.000.000	222	1.740.000.000
20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani (Siswa)	Siswa		374	814.000.000	406	812.000.000	438	876.000.000	470	940.000.000	502	1.004.000.000	502	4.446.000.000
21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani (Siswa)	Siswa		582	835.200.000	614	1.105.200.000	646	1.162.800.000	678	1.220.400.000	710	1.278.000.000	710	5.601.600.000
22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani (Siswa)	Siswa		238	361.800.000	270	486.000.000	302	543.600.000	334	601.200.000	366	658.800.000	366	2.651.400.000
23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani (Siswa)	Siswa		193	306.000.000	225	405.000.000	257	462.600.000	289	520.200.000	321	577.800.000	321	2.271.600.000
24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani (Siswa)	Siswa		589	1.063.800.000	621	1.117.800.000	653	1.175.400.000	685	1.233.000.000	717	1.290.600.000	717	5.880.600.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani (Siswa)	Siswa		145	250.000.000	177	318.600.000	209	376.200.000	241	433.800.000	273	491.400.000	273	1.870.000.000
26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N Simpang Rimba terlayani (Siswa)	Siswa		396	684.000.000	428	770.400.000	460	828.000.000	492	885.600.000	524	943.200.000	524	4.111.200.000
27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani (Siswa)	Siswa		874	1.362.600.000	900	1.630.800.000	900	1.620.000.000	900	1.620.000.000	900	1.620.000.000	900	7.853.400.000
28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani (Siswa)	Siswa		478	954.000.000	510	918.000.000	542	975.600.000	574	1.033.200.000	606	1.090.800.000	606	4.971.600.000
29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani (Siswa)	Siswa		83	567.000.000	90	630.000.000	100	700.000.000	105	735.000.000	110	770.000.000	110	3.402.000.000
E	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	Persen	0	76,610	29.501.200.000	79,290	31.271.000.000	81,970	33.131.400.000	84,640	35.032.200.000	90,000	37.349.000.000	90,000	166.284.800.000
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Jumlah sekolah terlayani (Sekolah)	Sekolah		20	9.400.000.000	21	10.000.000.000	21	10.500.000.000	21	11.000.000.000	22	12.000.000.000	22	52.900.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		1.073	2.420.000.000	1.100	2.200.000.000	1.100	2.200.000.000	1.100	2.200.000.000	1.100	2.200.000.000	1100	11.220.000.000
3	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		770	1.760.000.000	802	1.604.000.000	834	1.668.000.000	866	1.732.000.000	866	1.732.000.000	866	8.496.000.000
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		500	990.000.000	532	1.064.000.000	564	1.128.000.000	596	1.192.000.000	628	1.256.000.000	628	5.630.000.000
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani (Siswa)	Siswa		491	1.100.000.000	523	1.046.000.000	555	1.110.000.000	587	1.174.000.000	619	1.238.000.000	619	5.668.000.000
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani (Siswa)	Siswa		132	300.000.000	164	328.000.000	196	392.000.000	228	456.000.000	260	520.000.000	260	1.996.000.000
7	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani (Siswa)	Siswa		464	901.800.000	496	892.800.000	528	950.400.000	560	1.008.000.000	592	1.065.600.000	592	4.818.600.000
8	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani (Siswa)	Siswa		475	894.600.000	507	912.600.000	539	970.200.000	571	1.027.800.000	603	1.085.400.000	603	4.890.600.000
9	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		691	1.278.000.000	723	1.301.400.000	750	1.350.000.000	750	1.350.000.000	750	1.350.000.000	750	6.629.400.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		757	1.234.800.000	789	1.420.200.000	821	1.477.800.000	853	1.535.400.000	885	1.593.000.000	885	7.261.200.000
11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani (Siswa)	Siswa		131	585.000.000	140	705.000.000	150	750.000.000	160	800.000.000	170	850.000.000	170	3.690.000.000
12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani (Siswa)	Siswa		630	1.364.000.000	694	1.388.000.000	758	1.516.000.000	822	1.644.000.000	854	1.708.000.000	854	7.620.000.000
13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani (Siswa)	Siswa		509	990.000.000	541	1.082.000.000	573	1.146.000.000	605	1.210.000.000	637	1.274.000.000	637	5.702.000.000
14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani (Siswa)	Siswa		138	1.210.000.000	170	1.190.000.000	202	1.414.000.000	234	1.638.000.000	266	1.862.000.000	266	7.314.000.000
15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggiang terlayani (Siswa)	Siswa		148	384.000.000	180	360.000.000	212	424.000.000	244	488.000.000	276	552.000.000	276	2.208.000.000
16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani (Siswa)	Siswa		323	387.000.000	355	639.000.000	387	696.600.000	419	754.200.000	451	811.800.000	451	3.288.600.000





No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3	Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan UNBK (Sekolah)	Sekolah		67		67		68		68		68		68	20.000.000.000
		Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum (Sekolah)	Sekolah		67		67		68		68		68		68	
		SMA melaksanakan pendidikan karakter (Sekolah)	Sekolah		67	3.000.000.000	67	3.500.000.000	68	4.000.000.000	68	4.500.000.000	68	5.000.000.000		
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa (Siswa)	Siswa		2.437	2.924.400.000	2.485	2.982.000.000	2.534	3.040.800.000	2.584	3.100.800.000	2.635	3.162.000.000	12.675	15.210.000.000
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	Paket		22		25		25		30		30		132	89.000.000.000
		Terbangunnya WC/KM Siswa (Paket)	Paket		0		40		40		40		40		160	
		Tersedianya Sarpras SMA (Sekolah)	Sekolah		23	15.000.000.000	23	17.000.000.000	23	18.000.000.000	24	19.000.000.000	24	20.000.000.000	117	
		Terlaksananya rehabilitasi sekolah (Paket)	Paket		0		20		20		30		30		100	
		Jumlah RKB SMA Terbangun (Ruang)	Ruang		30		40		40		40		30		170	
		Terbangunnya RPS (Ruang)	Ruang		0		10		12		20		20		62	
G	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	%	0	0,000	50,000	42.670.800.000	50,000	46.414.000.000	100,000	48.657.200.000	100,000	50.801.600.000	100,000	228.172.400.000	
		Persentase SMK pariwisata Terkreditasi minimal A	Persen	66,67	100,000	100,000	39.628.800.000	100,000	42.670.800.000	100,000	46.414.000.000	100,000	50.801.600.000	100,000	228.172.400.000	
		APK SMK	Persen	31,44	34,980	38,380	39.628.800.000	38,380	42.670.800.000	40,630	46.414.000.000	44,320	50.801.600.000	48,620	228.172.400.000	
		APK SMK Perempuan	Persen	29,23	33,720	37,440	39.628.800.000	37,440	42.670.800.000	40,090	46.414.000.000	44,230	50.801.600.000	49,070	228.172.400.000	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Klembagaan SMK	Terlaksananya Gebyar SMK (Kali)	Kali		1	17.000.000.000	1	18.000.000.000	1	20.000.000.000	1	21.000.000.000	1	21.500.000.000	5	97.500.000.000	
		Terlaksananya Revitalisasi Prodi SMK (Sek)	Sekolah		56		57		57		58		58		58		
		Tersedianya Peralatan Praktik Siswa (Paket)	Paket		10		15		15		20		20		20		80
		Tersedianya Meubelair SMK (Set)	Paket		20		15		20		20		20		20		95
		Sekolah yang siap di akreditasi (%)	%		100		100		100		100		100		100		100
		Terlaksananya Rehabilitasi SMK (Paket)	Paket		37		20		20		15		20		20		112
		Tersedianya Bengkel Produktif SMK (Unit)	Unit		1		2		2		4		5		14		
		Terbangunnya RPS SMK (Ruang)	Ruang		5		7		10		10		10		42		
		Terbangunnya RKB SMK (Ruang)	Ruang		10		10		20		20		20		80		
2	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Sekolah melaksanakan pendidikan karakter (Sekolah)	Sekolah		56	6.000.000.000	57	6.500.000.000	58	7.000.000.000	58	8.000.000.000	58	8.500.000.000	58	30.000.000.000	
		Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK (Jenis)	Jenis		7		7		7		7		7		7		
		Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK (Sekolah)	Sekolah		56		57		58		58		58		58		
3	Pengembangan Kurikulum SMK	SMK melaksanakan UNBK (Sekolah)	Sekolah		56	2.500.000.000	57	3.000.000.000	58	3.200.000.000	58	3.400.000.000	58	3.500.000.000	58	15.600.000.000	
		Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK (Sekolah)	Sekolah		56		57		58		58		58				
		Tersedianya Asesor (Orang)	Orang		30		50		50		60		70		260		
		Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK (Dok)	Dokumen		1		1		1		1		1		5		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		SMK memiliki TUK (Sekolah)	Sekolah		25		30		40		45		50		190	
		Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK (Dok)	Dokumen		1		1		1		1		1		5	
4	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai (Siswa)	Siswa		1.774	2.128.800.000	1.809	2.170.800.000	1.845	2.214.000.000	1.881	2.257.200.000	1.918	2.301.600.000	9227	11.072.400.000
5	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Tersedianya rumah dinas /asrama (Unit)	Unit		4	12.000.000.000	4	13.000.000.000	4	14.000.000.000	4	14.000.000.000	4	15.000.000.000	20	68.000.000.000
		Terbangunnya RKB SMK (Ruang)	Ruang		4		20		30		50		50		154	
		Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	Paket		0		10		20		25		25		80	
		Terbangunnya RPS (Unit)	Unit		25		25		30		25		25		130	
		Terbangunnya WC/KM Siswa (Unit)	Unit		0		30		30		30		30		120	
H	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	Persentase SLB terakreditasi minimal A	Persen	77,78	100,000	10.700.000.000	100,000	13.600.000.000	100,000	14.700.000.000	100,000	15.900.000.000	100,000	17.350.000.000	100,000	72.250.000.000
		APK SLB	Persen	19,68	22,950		26,210		29,470		32,740		36,000		36,000	
1	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	RPS SLB terbangun (Ruang)	Ruang		4	2.000.000.000	4	2.500.000.000	2	2.700.000.000	2	2.750.000.000	2	2.800.000.000	14	12.750.000.000
		Tersedianya meubelair SLB (Paket)	Paket		9		18		18		10		10		65	
		Tersedianya Peralatan praktik siswa (Paket)	Paket		0		0		1		1		1		3	
		SLB yang direhabilitasi (Paket)	Paket		4		2		1		1		1		9	
		RKB SLB terbangun (Ruang)	Ruang		0		4		10		10		10		10	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB (Sekolah)	Sekolah		9	1.500.000.000	9	1.550.000.000	9	1.600.000.000	9	1.700.000.000	9	1.800.000.000	9	8.150.000.000
		Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB (Jenis)	Jenis		4		4		4		4		4		4	
3	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga (Sekolah)	Sekolah		9	800.000.000	9	850.000.000	9	900.000.000	9	950.000.000	9	1.000.000.000	9	4.500.000.000
		Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 (Sekolah)	Sekolah		9		9		9		9		9			
4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis (Bulan)	Bulan		12	1.400.000.000	12	2.700.000.000	12	2.500.000.000	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	
5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Tersedianya Asrama SLB (Unit)	Unit		0	5.000.000.000	1	6.000.000.000	3	7.000.000.000	2	8.000.000.000	3	9.000.000.000	9	35.000.000.000
		Tersedianya RKB SLB (Unit)	Unit		39		25		20		20		124			
		Tersedianya peralatan Praktik Siswa (Paket)	Paket		0		4		4		7		7		22	
		Terlaksananya Rehabilitasi SLB (Paket)	Paket		1		4		4		10		10		29	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4,	Persen	0	95,000	5.182.994.000	97,000	7.500.000.000	100,000	9.000.000.000	100,000	10.200.000.000	100,000	11.100.000.000	100,000	42.982.994.000
		Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Persen	34,82	36,000		40,000		45,000		50,000		60,000		60,000	
		Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	Persen	82,16	85,000		90,000		95,000		100,000		100,000		100,000	
1	Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah guru SMA menerima beasiswa S1 dan S2 (Orang)	Orang		5	1.682.994.000	15	2.500.000.000	25	3.000.000.000	30	3.500.000.000	30	4.000.000.000	30	14.682.994.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya analisis kebutuhan guru SMA (Dokumen)	Dokumen		1		1		1		1		1		5	
		Jumlah guru dan tenaga kependidikan terlatih (Orang)	Orang		405		450		450		450		450		2205	
2	Peningkatan Mutu PTK SMK	Jumlah guru SMK menerima beasiswa S1 dan S2 (Orang)	Orang		5		15		25		30		30		30	
		Tersedianya analisis kebutuhan guru SMK (Dok)	Dokumen		1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.500.000.000	1	3.700.000.000	1	4.000.000.000	5	16.200.000.000
		Jumlah guru dan Tenaga Kependidikan terlatih (Orang)	Orang		405		450		450		450		450		2205	
3	Peningkatan Mutu PTK SLB	Guru SLB menerima beasiswa S1 (Orang)	Orang		5		10		15		15		15		15	
		Jumlah guru dan Tenaga kependidikan SLB terlatih (Orang)	Orang		120	1.500.000.000	150	2.000.000.000	150	2.500.000.000	150	3.000.000.000	150	3.100.000.000	720	16200000000
		Tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB (Dokumen)	Dokumen		1		1		1		1		1		5	
		Terlatihnya guru sekolah inklusi (Orang)	Orang		50		50		50		50		50		250	
J	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	Persen	100	100,000	44.434.572.000	100,000	46.656.300.200	100,000	48.989.115.660	100,000	51.428.571.427	100,000	54.010.499.982	100,000	245.519.059.269
1	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	156.660.000	100	164.493.000	100	172.717.650	100	181.353.533	100	190.421.209	100	865.645.392

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	88.200.000	100	92.610.000	100	97.240.500	100	102.102.525	100	107.207.651	100	487.360.676
3	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	88.200.000	100	92.610.000	100	97.240.500	100	102.102.525	100	107.207.651	100	487.360.676
4	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	88.200.000	100	92.610.000	100	97.240.500	100	102.102.525	100	107.207.651	100	487.360.676
5	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	88.200.000	100	92.610.000	100	97.240.500	100	102.102.525	100	107.207.651	100	487.360.676
6	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	112.350.000	100	117.967.500	100	123.865.875	100	130.059.169	100	136.562.127	100	620.804.671
7	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	88.200.000	100	92.610.000	100	97.240.500	100	102.102.525	100	107.207.651	100	487.360.676
8	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	702.072.000	100	737.175.600	100	774.034.380	100	812.736.099	100	853.372.904	100	3.879.390.983
9	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	631.512.000	100	663.087.600	100	696.241.980	100	731.054.079	100	767.606.783	100	3.489.502.442
10	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	680.904.000	100	714.949.200	100	750.696.660	100	788.231.498	100	827.643.068	100	3.762.424.426
11	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	520.380.000	100	546.399.000	100	573.718.950	100	602.404.898	100	632.525.142	100	2.875.427.990

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
12	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.206.870.000	100	1.267.213.500	100	1.330.574.175	100	1.397.102.884	100	1.466.958.028	100	6.668.718.587
13	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	2.265.270.000	100	2.378.533.500	100	2.497.460.175	100	2.622.333.184	100	2.753.449.843	100	12.517.046.702
14	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	942.270.000	100	989.383.500	100	1.038.852.675	100	1.090.795.309	100	1.145.335.074	100	5.206.636.558
15	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	692.370.000	100	726.988.500	100	763.337.925	100	801.504.821	100	841.580.062	100	3.825.781.308
16	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	511.560.000	100	537.138.000	100	563.994.900	100	592.194.645	100	621.804.377	100	2.826.691.922
17	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	193.158.000	100	202.815.900	100	212.956.695	100	223.604.530	100	234.784.756	100	1.067.319.881
18	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	428.652.000	100	450.084.600	100	472.588.830	100	496.218.272	100	521.029.185	100	2.368.572.887
19	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	429.534.000	100	451.010.700	100	473.561.235	100	497.239.297	100	522.101.262	100	2.373.446.494
20	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	156.114.000	100	163.919.700	100	172.115.685	100	180.721.469	100	189.757.543	100	862.628.397
21	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	358.974.000	100	376.922.700	100	395.768.835	100	415.557.277	100	436.335.141	100	1.983.557.953

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
22	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	666.792.000	100	700.131.600	100	735.138.180	100	771.895.089	100	810.489.843	100	3.684.446.712
23	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	433.944.000	100	455.641.200	100	478.423.260	100	502.344.423	100	527.461.644	100	2.397.814.527
24	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	52.038.000	100	54.639.900	100	57.371.895	100	60.240.490	100	63.252.514	100	287.542.799
25	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Siliip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	223.146.000	100	234.303.300	100	246.018.465	100	258.319.388	100	271.235.358	100	1.233.022.511
26	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	760.284.000	100	798.298.200	100	838.213.110	100	880.123.766	100	924.129.954	100	4.201.049.030
27	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	430.710.000	100	452.245.500	100	474.857.775	100	498.600.664	100	523.530.697	100	2.379.944.636
28	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	445.410.000	100	467.680.500	100	491.064.525	100	515.617.751	100	541.398.639	100	2.461.171.415
29	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	377.790.000	100	396.679.500	100	416.513.475	100	437.339.149	100	459.206.106	100	2.087.528.230
30	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.561.140.000	100	1.639.197.000	100	1.721.156.850	100	1.807.214.693	100	1.897.575.427	100	8.626.283.970
31	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	979.020.000	100	1.027.971.000	100	1.079.369.550	100	1.133.338.028	100	1.190.004.929	100	5.409.703.507

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
32	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	525.672.000	100	551.955.600	100	579.553.380	100	608.531.049	100	638.957.601	100	2.904.669.630
33	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	532.728.000	100	559.364.000	100	587.332.620	100	616.699.251	100	647.534.214	100	2.943.658.085
34	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	515.088.000	100	540.842.400	100	567.884.520	100	596.278.746	100	626.092.683	100	2.846.186.349
35	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	283.122.000	100	297.278.100	100	312.142.005	100	327.749.105	100	344.136.561	100	1.564.427.771
36	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	441.000.000	100	463.050.000	100	486.202.500	100	510.512.625	100	536.038.256	100	2.436.803.381
37	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	306.936.000	100	322.282.800	100	338.396.940	100	355.316.787	100	373.082.626	100	1.696.015.153
38	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	767.340.000	100	805.707.000	100	845.992.350	100	888.291.968	100	932.706.566	100	4.240.037.884
39	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	977.550.000	100	1.026.427.500	100	1.077.748.875	100	1.131.636.319	100	1.188.218.135	100	5.401.580.829
40	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	896.700.000	100	941.535.000	100	988.611.750	100	1.038.042.338	100	1.089.944.454	100	4.954.833.542
41	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	405.720.000	100	426.006.000	100	447.306.300	100	469.671.615	100	493.155.196	100	2.241.859.111

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
42	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	530.964.000	100	557.512.200	100	585.387.810	100	614.657.201	100	645.390.061	100	2.933.911.272
43	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	324.576.000	100	340.804.800	100	357.845.040	100	375.737.292	100	394.524.157	100	1.793.487.289
44	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	360.738.000	100	378.774.900	100	397.713.645	100	417.599.327	100	438.479.294	100	1.993.305.166
45	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	349.272.000	100	366.735.600	100	385.072.380	100	404.325.999	100	424.542.299	100	1.929.948.278
46	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	204.624.000	100	214.855.200	100	225.597.960	100	236.877.858	100	248.721.751	100	1.130.676.769
47	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	462.168.000	100	485.276.400	100	509.540.220	100	535.017.231	100	561.768.093	100	2.553.769.944
48	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	579.180.000	100	608.139.000	100	638.545.950	100	670.473.248	100	703.996.910	100	3.200.335.108
49	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.153.950.000	100	1.211.647.500	100	1.272.229.875	100	1.335.841.369	100	1.402.633.437	100	6.376.302.181
50	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.284.780.000	100	1.349.019.000	100	1.416.469.950	100	1.487.293.448	100	1.561.658.120	100	7.099.220.518
51	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.049.580.000	100	1.102.059.000	100	1.157.161.950	100	1.215.020.048	100	1.275.771.050	100	5.799.592.048

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
52	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	292.530.000	100	307.156.500	100	322.514.325	100	338.640.041	100	355.572.043	100	1.616.412.909
53	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	406.602.000	100	426.932.100	100	448.278.705	100	470.692.640	100	494.227.272	100	2.246.732.717
54	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	153.468.000	100	161.141.400	100	169.198.470	100	177.658.394	100	186.541.313	100	848.007.577
55	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	191.394.000	100	200.963.700	100	211.011.885	100	221.562.479	100	232.640.603	100	1.057.572.667
56	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	493.038.000	100	517.689.900	100	543.574.395	100	570.753.115	100	599.290.770	100	2.724.346.180
57	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	80.262.000	100	84.275.100	100	88.488.855	100	92.913.298	100	97.558.963	100	443.498.216
58	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	321.930.000	100	338.026.500	100	354.927.825	100	372.674.216	100	391.307.927	100	1.778.866.468
59	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	725.886.000	100	762.180.300	100	800.289.315	100	840.303.781	100	882.318.970	100	4.010.978.366
60	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	402.192.000	100	422.301.600	100	443.416.680	100	465.587.514	100	488.866.890	100	2.222.364.684
61	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	542.430.000	100	569.551.500	100	598.029.075	100	627.930.529	100	659.327.055	100	2.997.268.159

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
62	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	151.410.000	100	158.980.500	100	166.929.525	100	175.276.001	100	184.039.801	100	836.635.827
63	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	486.570.000	100	510.898.500	100	536.443.425	100	563.265.596	100	591.428.876	100	2.688.606.397
64	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	85.260.000	100	89.523.000	100	93.999.150	100	98.699.108	100	103.634.063	100	471.115.321
65	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.020.180.000	100	1.071.189.000	100	1.124.748.450	100	1.180.985.873	100	1.240.035.166	100	5.637.138.489
66	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	386.610.000	100	405.940.500	100	426.237.525	100	447.549.401	100	469.926.871	100	2.136.264.297
67	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	391.608.000	100	411.188.400	100	431.747.820	100	453.335.211	100	476.001.972	100	2.163.881.403
68	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	401.310.000	100	421.375.500	100	442.444.275	100	464.566.489	100	487.794.813	100	2.217.491.077
69	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	590.940.000	100	620.487.000	100	651.511.350	100	674.086.918	100	718.291.263	100	3.255.316.531
70	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	618.282.000	100	649.196.100	100	681.655.905	100	715.738.700	100	751.525.635	100	3.416.398.340
71	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	673.260.000	100	706.923.000	100	742.269.150	100	779.382.608	100	818.351.738	100	3.720.186.496

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
72	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	194.040.000	100	203.742.000	100	213.929.100	100	224.625.555	100	235.856.833	100	1.072.193.488
73	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.578.780.000	100	1.657.719.000	100	1.740.604.950	100	1.827.635.198	100	1.919.016.957	100	8.723.756.105
74	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	1.152.480.000	100	1.210.104.000	100	1.270.609.200	100	1.334.139.660	100	1.400.846.643	100	6.368.179.503
75	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	735.000.000	100	771.750.000	100	810.337.500	100	850.854.375	100	893.397.094	100	4.061.338.969
76	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	283.122.000	100	297.278.100	100	312.142.005	100	327.749.105	100	344.136.561	100	1.564.427.771
77	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	500.094.000	100	525.098.700	100	551.353.635	100	578.921.317	100	607.867.383	100	2.763.335.035
78	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	344.862.000	100	362.105.100	100	380.210.355	100	399.220.873	100	419.181.916	100	1.905.580.244
79	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	533.610.000	100	560.290.500	100	588.305.025	100	617.720.276	100	648.606.290	100	2.948.532.091
80	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	343.980.000	100	361.179.000	100	379.237.950	100	398.199.848	100	418.109.840	100	1.900.706.638
81	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	269.010.000	100	282.460.500	100	296.583.525	100	311.412.701	100	326.983.336	100	1.486.450.062

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome dan Output)	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2017)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Akhir Renstra (2022)	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
82	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	671.790.000	100	705.379.500	100	740.648.475	100	777.680.899	100	816.564.944	100	3.712.063.818
83	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	884.940.000	100	929.187.000	100	975.646.380	100	1.024.428.668	100	1.075.650.101	100	4.889.852.149
84	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	%	100	100	216.090.000	100	226.894.500	100	238.239.225	100	250.151.186	100	262.658.746	100	1.194.033.657

## BAB VI

### BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dari tabel 5.2 di atas diketahui bahwa ada keterkaitan antara indikator kinerja SKPD dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD. Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022.

**Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	APK Pendidikan Menengah*)	69,33%	76,49%	85,77%	89,67%	96,10%	100,85%	100,85%
2	APK SLB	0,37%	0,37%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,42%
3	% SMA/SMK Terakreditasi Min A	32,50%	35,77%	40%	46,83%	53,17%	59,52%	59,52%
4	Rata-rata Nilai UN SMA dan SMK	6,2	6,3	6,5	6,8	7,0	7,3	7,3
5	% SLB Terakreditasi Min A	0%	30%	50%	80%	100%	100%	100%
6	% Lulusan SMK yang Bekerja							

Keterangan :

APK Pendidikan menengah tidak termasuk program paket C

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017*	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
<b>E</b>	<b>Manajemen Layanan Pendidikan</b>																		
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Pendataan				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Pelaporan				4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL L.2.**  
**ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK USIA PENDIDIKAN MENENGAH BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2017 – 2022**

Kab/Kota	Tahun							
	2015 *)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pangkalpinang	10.492	10.266	10.035	9.806	9.615	9.512	9.534	9.643
Bangka	16.492	16.531	16.651	16.806	16.950	17.064	17.129	17.167
Bangka Barat	9.947	9.962	10.120	10.333	10.544	10.750	10.945	11.133
Bangka Tengah	10.252	10.154	10.109	10.084	10.067	10.075	10.119	10.194
Bangka Selatan	10.732	10.760	10.872	11.016	11.148	11.265	11.356	11.429
Belitung	9.694	9.791	9.764	9.692	9.631	9.589	9.575	9.575
Belitung Timur	5.902	5.985	6.034	6.071	6.119	6.189	6.288	6.399
Provinsi	73.511	73.449	73.585	73.808	74.074	74.444	74.946	75.540

Sumber : Diolah dari data Babel Dalam Angka 2016 dengan Metode Sprague

**TABEL L.3**  
**DATA PENDIDIKAN SD SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No.	Variabel	SD	MI	SDLB	Paket A	Jumlah
1	Sekolah	802	31	9	x	842
	a. Negeri	753	12	7	x	772
	b. Swasta	49	19	2	x	70
	Sekolah Berakreditasi	802	31	9	x	842
	a. Akreditasi A	52	4	0	x	56
	b. Akreditasi B	592	15	0	x	607
	c. Akreditasi C	86	10	0	x	96
	d. Tidak Terakreditasi	9	2	0	x	11
	e. Belum Diakreditasi	63	0	9	x	72
2	Siswa baru menurut usia	44.082	1.033	x	x	45.115
	a. Usia 6-7 tahun	43.793	906	x	x	44.699
	b. Usia lainnya	289	127	x	x	416
	Siswa baru menurut asal	44.082	1.033	x	x	45.115
	a. Tamatan TK	17.929	594	x	x	18.523
	b. Rumah Tangga	26.153	439	x	x	26.592
3	Siswa menurut usia sekolah	160.167	5.820	565	1.063	167.615
	a. <7 tahun	18.002	674	0	0	18.676
	b. 7-12 tahun	137.329	4.995	565	1.063	143.952
	c. >12 tahun	4.836	151	0	0	4.987
	Siswa menurut jenis kelamin	160.167	5.820	565	1.063	167.615
	a. laki-laki	83.882	2.852	346	530	87.610
	- <7 tahun	8.972	352	0	0	9.324
	- 7-12 tahun	71.652	2.388	346	530	74.916
	- >12 tahun	3.258	112	0	0	3.370
	b. perempuan	76.285	2.968	219	533	80.005
	- <7 tahun	9.030	322	0	0	9.352
	- 7-12 tahun	65.677	2.607	219	533	69.036
	- >12 tahun	1.578	39	0	0	1.617
	Siswa menurut status sekolah	160.167	5.820	565	x	166.552
	a. Negeri	149.035	2.686	464	x	152.185
	b. Swasta	11.132	3.134	101	x	14.367
	Siswa menurut tingkat	160.167	5.820	x	x	165.987
	a. Kelas 1	28.598	1.265	x	x	29.863
b. Kelas 2	28.032	1.109	x	x	29.141	
c. Kelas 3	27.319	971	x	x	28.290	
d. Kelas 4	26.757	856	x	x	27.613	
e. Kelas 5	25.042	813	x	x	25.855	
f. Kelas 6	24.419	806	x	x	25.225	
4	Mengulang	4.560	260	x	x	4.820
	a. Kelas 1	1.543	93	x	x	1.636

No.	Variabel	SD	MI	SDLB	Paket A	Jumlah
	b. Kelas 2	943	61	x	x	1.004
	c. Kelas 3	986	43	x	x	1.029
	d. Kelas 4	636	41	x	x	677
	e. Kelas 5	452	20	x	x	472
	f. Kelas 6	0	2	x	x	2
5	Putus sekolah	81	28	x	x	109
	a. Kelas 1	8	3	x	x	11
	b. Kelas 2	10	2	x	x	12
	c. Kelas 3	11	3	x	x	14
	d. Kelas 4	16	5	x	x	21
	e. Kelas 5	17	11	x	x	28
	f. Kelas 6	19	4	x	x	23
6	Lulusan	23.858	738	x	0	24.596
7	KS dan Guru menurut ijazah	15.252	377	144	0	15.773
	a. Ijazah < S1	2.260	190	41	0	2.491
	b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	12.992	187	103		13.282
	KS dan Guru menurut status kepegawaian	15.252	377	144	0	15.773
	a. PNS	10.459	171	93	0	10.723
	b. Non-PNS	4.793	206	51	0	5.050
	KS dan Guru menurut Sertifikasi	15.252	377	144	0	15.773
	a. Sudah	3.355	139	34	0	3.528
	b. Belum	11.897	238	110	0	12.245
8	Rombongan belajar (Kelas)	6.401	233	x	0	6.634
9	Ruang kelas	6.643	217	x	x	6.860
	a. Baik	2.660	174	x	x	2.834
	b. Rusak ringan	3.547	36	x	x	3.583
	c. Rusak Sedang	219	7	x	x	226
	d. Rusak Berat	146	0	x	x	146
	e. Rusak Total	71	0	x	x	71
10	Perpustakaan	787	26	x	x	813
	a. Baik	756	24	x	x	780
	b. Rusak	31	2	x	x	33
11	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	688	13	x	x	701
	a. Baik	670	11	x	x	681
	b. Rusak	18	2	x	x	20
12	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	802	10	x	x	812
	a. Milik	802	10	x	x	812
	b. Bukan Milik	0	0	x	x	0
13	Laboratorium IPA	74	10	x	x	84
	a. Baik	70	10	x	x	80
	b. Rusak	4	0	x	x	4

TABEL L.4.

## DATA POKOK PENDIDIKAN JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2016/2017

No.	Variabel	SMP	MTS	SMPLB	Paket B	Jumlah	
1	Sekolah	205	51	9	x	265	
	a. Negeri	157	18	7	x	182	
	b. Swasta	48	33	2	x	83	
	Sekolah Berakreditasi	205	51	9	x	265	
	a. Akreditasi A	51	4	0	x	55	
	b. Akreditasi B	97	8	0	x	105	
	c. Akreditasi C	31	6	0	x	37	
	d. Tidak Terakreditasi	5	7	0	x	12	
	e. Belum Diakreditasi	21	26	9	x	56	
2	Siswa baru	20.126	1.180	x	x	21.306	
3	Siswa menurut usia sekolah	60.498	6.256	205	2.631	69.590	
	a. <13 tahun	13.635	703	0	0	14.338	
	b. 13-15 tahun	43.357	5.017	205	2.631	51.210	
	c. >15 tahun	3.506	536	0	0	4.042	
	Siswa menurut jenis kelamin	60.498	6.256	205	2.631	69.590	
	a. laki-laki	30.511	3.065	122	1.184	34.882	
	< 13 tahun	6.187	583	0	0	6.770	
	- usia 13-15 tahun	21.973	2.119	122	1.184	25.398	
	> 15 tahun	2.351	363	0	0	2.714	
	b. perempuan	29.987	3.191	83	1.447	34.708	
	< 13 tahun	7.448	120	0	0	7.568	
	- usia 13-15 tahun	21.384	2.898	83	1.447	25.812	
	> 15 tahun	1.155	173	0	0	1.328	
	Siswa menurut status sekolah	60.498	6.256	205	x	66.959	
	a. Negeri	52.053	3.384	178	x	55.615	
	b. Swasta	8.445	2.872	27	x	11.344	
	Siswa menurut tingkat	60.498	6.256	x	x	66.754	
	a. Kelas 7	21.168	1.198	x	x	22.366	
	b. Kelas 8	20.842	2.944	x	x	23.786	
	c. Kelas 9	18.488	2.114	x	x	20.602	
	Siswa menurut tingkat th 2014/2015	57.409	8.030	x	x	65.439	
	a. Kelas 7	20.881	3.128	x	x	24.009	
	b. Kelas 8	18.870	2.544	x	x	21.414	
	c. Kelas 9	17.658	2.358	x	x	20.016	
	4	Mengulang	193	84	x	x	277
		a. Kelas 7	75	44	x	x	119
		b. Kelas 8	118	17	x	x	135
c. Kelas 9		0	23	x	x	23	
5	Putus sekolah	28	4	x	x	32	

No.	Variabel	SMP	MTS	SMPLB	Paket B	Jumlah
	a. Kelas 7	11	11	x	x	22
	b. Kelas 8	7	14	x	x	21
	c. Kelas 9	10	11	x	x	21
6	Lulusan	17.51 4	2.360	x	0	19.87 4
	KS dan Guru menurut ijazah	3.171	993	144	0	4.308
7	a. Ijazah < S1	314	270	41	0	625
	b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	2.857	723	103	0	3.683
	KS dan Guru menurut status kepegawaian	3.171	993	144	0	4.308
	a. PNS	1.986	174	93	0	2.253
	b. Non-PNS	1.185	819	51	0	2.055
	KS dan Guru menurut sertifikasi	3.171	993	144	0	4.308
	a. Sudah	894	171	34	0	1.099
	b. Belum	2.277	822	110	0	3.209
8	Rombongan belajar (Kelas)	1.918	264	x	0	2.182
9	Ruang kelas	2.080	608	x	x	2.688
	a. Baik	905	304	x	x	1.209
	b. Rusak ringan	989	284	x	x	1.273
	c. Rusak Sedang	64	15	x	x	79
	d. Rusak Berat	61	5	x	x	66
	e. Rusak Total	61	0	x	x	61
10	Perpustakaan	183	34	x	x	217
	a. Baik	167	34	x	x	201
	b. Rusak	16	0	x	x	16
11	Ruang UKS	95	18	x	x	113
	a. Baik	86	17	x	x	103
	b. Rusak	9	1	x	x	10
12	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	86	25	x	x	111
	a. Milik	86	25	x	x	111
	b. Bukan Milik	0	0	x	x	0
13	Laboratorium IPA	165	0	x	x	165
	a. Baik	150	0	x	x	150
	b. Rusak	15	0	x	x	15

TABEL L.5.

## PROYEKSI JUMLAH SISWA SMA, SMK DAN MA TAHUN 2017 – 2022

Jenjang Pendidikan	Estimasi Jumlah Siswa Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SMA	24.378	26.046	28.800	30.249	32.550	33.196
SMK	23.134	25.821	28.430	30.249	33.215	36.727
MA	3.502	4.590	6.306	6.256	6.256	6.256

TABEL L.6

## PROYEKSI KEBUTUHAN RUANG KELAS BARU SMA/SMK TAHUN 2017 – 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Estimasi Penambahan jumlah siswa SMA	1.668	2.754	1.449	2.301	645
Estimasi Penambahan Jumlah Siswa SMK	2.687	2.609	1.819	2.966	3.512
Kebutuhan RKB SMA	52	86	45	71	20
Kebutuhan RKB SMK	83	81	56	92	109

TABEL L.7

## PROYEKSI PENAMBAHAN JUMLAH SISWA SLB TAHUN 2017 – 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Estimasi Siswa SDLB	565	578	600	625	650	670
Estimasi Siswa SMPLB	205	220	245	260	280	295
Estimasi Siswa SMALB	84	94	104	114	125	150
TOTAL SISWA SLB	854	892	949	999	1055	1115

## INDIKATOR KINERJA

Nama Indikator	Rumus	Keterangan
APK Pendidikan Menengah	$APK \text{ Dikmen} = \frac{\sum \text{Siswa SMA, SMK, MA}}{\sum \text{Penduduk Usia 16 - 18 Th}}$ <p>APK Dikmen = APK SMA + APK SMK + APK MA</p>	Digunakan untuk menghitung akses pendidikan
APK SMA	$APK \text{ SMA} = \frac{\sum \text{Siswa SMA}}{\sum \text{Penduduk Usia 16 - 18 Th}}$	Digunakan untuk menghitung akses pendidikan SMA
APK SMK	$APK \text{ SMK} = \frac{\sum \text{Siswa SMK}}{\sum \text{Penduduk Usia 16 - 18 Th}}$	Digunakan untuk menghitung akses pendidikan SMK
APK SLB	$APK \text{ SLB} = \frac{\sum \text{Siswa SLB}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 18 Th}}$	Digunakan untuk menghitung keterlayanan SLB
APK SDLB	$APK \text{ SDLB} = \frac{\sum \text{Siswa SDLB}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Th}}$	Digunakan untuk menghitung keterlayanan SDLB
APK SMPLB	$APK \text{ SMPLB} = \frac{\sum \text{Siswa SMPLB}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 Th}}$	Digunakan untuk menghitung keterlayanan SMPLB
APK SMALB	$APK \text{ SMALB} = \frac{\sum \text{Siswa SMALB}}{\sum \text{Penduduk Usia 16 - 18 Th}}$	Digunakan untuk menghitung keterlayanan SMALB
% SMA, SMK dan SLB Terakreditasi Min A	$\frac{\sum \text{SMA, SMK dan SLB Terakreditasi A}}{\sum \text{SMA, SMK dan SLB}} \times 100\%$	Digunakan untuk menghitung tingkat mutu pendidikan
% SMA Terakreditasi Min A	$\frac{\text{Jumlah SMA Terakreditasi A}}{\text{Jumlah SMA}} \times 100\%$	Digunakan untuk menghitung tingkat mutu pendidikan SMA
% Program Keahlian SMK Terakreditasi Min A	$\frac{\text{Jumlah PK SMK Terakreditasi A}}{\text{Jumlah PK SMK}} \times 100\%$	Digunakan untuk menghitung tingkat mutu pendidikan SMK
% SLB Terakreditasi Min A	$\frac{\sum \text{SDLB, SMPLB, SMALB Terakreditasi A}}{\sum \text{SDLB, SMPLB, SMALB}} \times 100\%$	Digunakan untuk menghitung tingkat mutu pendidikan SLB